

**PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF KADER HMI  
CABANG BANDAR LAMPUNG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh :  
Nafis  
NPM. 1331040039**

**Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

### **PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF KADER HMI CABANG BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
NAFIS**

Partai Politik adalah salah satu elemen terpenting bagi sebuah negara yang ingin menerapkan sistem demokrasi. Karena, partai adalah puncak dari sebuah organisasi. Partai politik juga banyak lahir ketika masa demokrasi. selain sebagai puncak dari organisasi partai juga mempunyai fungsi yang terpenting dimana fungsinya sebagai media komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik. Di negara Indonesia sendiri telah banyak lahir partai. baik itu berbasis agama, nasionalis bahkan perpaduan dari kedua nya.

HMI adalah salah satu organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berbasis islam tertua di Indonesia dan berfungsi sebagai kader. Salah satu tujuan dari HMI adalah bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi allah S.W.T. masyarakat adil makmur akan tercipta jika pemimpinnya baik dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bernegara. Negara Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem multi partai, berarti sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum (pemilu), dan semuanya memiliki hak yang sama untuk memegang kendali tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi.

banyaknya kasus-kasus yang melanda Partai Politik Islam akhir-akhir ini, menimbulkan perspektif atau tanggapan beragam di kalangan kader HMI Cabang Bandar Lampung. Sehingga banyak dari kader yang pada mulanya simpati terhadap partai-partai politik islam tertentu menjadi kecewa dan sangat menyayangkan sikap-sikap oknum para elit partai politik yang sering memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Masalah penelitian yang penulis kemukan adalah bagaimana perspektif kader HMI Cabang Bandar lampung terhadap partai politik islam dan seperti apa dampak yang ditimbulkan dari perspektif tersebut terhadap partai politik islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnalserta bahan-bahan yang terkait.

Temuan-temuan yang diperoleh dari skripsi ini mengemukakan bahwasanya kader HMI mempunyai perspektif yang hampir sama terkait adanya partai politik islam dimana mereka menegemukan bahwasanya partai politik islam adalah representasi agama islam dalam bidang politik. namun terkait jumlah partai islam saat ini kader mempunyai pendapat yang beraneka raga dimana ada yang ingin partai islam dijadikan satu dan ada yang ingin tetap masing-masing dukarekan seriap partai mempunya latar belakang yang berbeda. Adanya

permasalahan yang dihadapi partai politik islam seperti tidak ada perbedaan partai politik islam dengan partai nasionalis serta korupsi yang dilakukan oknum partai islam kader mempunyai pendapat yang berbeda dan ini berdampak pada pilihan kader dalam momen pemilihan umum dimana akibat adanya permasalahan yang dijera partai kader mempunyai pilihan yang berbed dimana ada yang tetap memilih partai politik islam dikarenakan sebagai bentuk apresiasi islam dalam bidang politik (politik identitas), ada yang melihat bukan partai nya tetapi lebih melihat sosok atau figur dan visi misi dari calon, dan ada yang lebih memilih partai nasionalis dikarenakan mereka lebih bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**JUDUL SKRIPSI : Partai Politik Islam dalam Perspektif Kader HMI Cabang  
Bandar Lampung**

**Nama : Nafis**

**NPM : 1331040039**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam (PPI)**

**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

**untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas**

**Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden intan Lampung**

**Bandar Lampung, 4 Mei 2018**

**pembimbing I**

**pembimbing II**

**Drs. Effendi, M.Hum**  
**NIP. 195807211986031004**

**Ellya Rosana, S.Sos, M.H**  
**NIP. 19741223199032002**

**Ketua Jurusan**  
**Pemikiran Politik Islam,**

**DR. Nadirsah Hawari, M.A**  
**NIP. 197406828200811013**





**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF KADER**

**HMI CABANG BANDAR LAMPUNG**, Disusun oleh **NAFIS**, NPM : **1331040039**,

Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas

Ushuluddin dan Studi Agama pada hari/tanggal : Jum'at, 4 Mei 2018.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Himyari Yusuf, M. Hum.

Sekretaris : Dr. Nadirsah Hawari, M. Ag.

Penguji I : Dr. Sidi Ritaudin, M. Ag.

Penguji II : Drs. Effendi, M. Hum.

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**



**Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag**  
**NIP. 195808231993031001**


## PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafis  
Npm : 1331040039  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)  
Judul skripsi : **Partai Politik Islam Dalam Perspektif Kader HMI Cabang Bandar Lampung**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul, Partai Politik Islam dalam perspektif kader HMI Cabang Bandar Lampung adalah benar-benar karya asli saya, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sangsi yang diakibatkannya.



Bandar Lampung, 2018

Nafis  
Npm. 13310140039

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>1</sup>

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen agama, mushaf al-qur'an terjemah (Jakarta: al-huda kelompok gema insani, 2002), h. 64.

<sup>2</sup> Ibid, 118.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku yang sangat kusayangi dan kukasihi . Mudarsyah dan Subaila, karena berkat usaha mereka dan didikan mereka sehingga penulis bisa sebesar dan setangguh sekarang.
2. Adik-Adikku Wahyuni Febriyani dan Lila Novalia terima kasih atas kasih sayang yang telah kau berikan kepadaku
3. Seseorang yang kelak menjadi bidadari syurgaku aku mengucapkan terima kasih karena telah rela menemaniku dan memberikan motivasi kepadaku yang namanya menjadi rahasia.
4. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 13 khususnya Jurusan Pemikiran Politik Islam terima kasih atas segala warna yang telah kalian berikan.
5. Teman-teman sehimpuan dan secita HMI Cabang Bandar Lampung khususnya komisariat Ushuluddin.
6. Para dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengamalan yang tidak bisa dilupakan.



## RIWAYAT HIDUP

Nafis dilahirkan di kampung yang sangat indah dan penuh warna yang ada di salah satu Provinsi Lampung yang berada di Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji adalah kabupaten hasil pemekakaran dari Kabupaten Tulang bawang yang mekar menjadi 3 Kabupaten yaitu tulang bawang, tulang bawang barat, dan kabupaten Mesuji pada tahun 2009. Kabupaten Mesuji sendiri itu mempunyai 7 kecamatan dengan 114 desa dan di kecamatan Mesuji di desa nipah kuning nafis dilahirkan dari pasangan yang penuh warna dan penuh kasih sayang yaitu Mudarsyah dan Subaila.

Nafis adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan Nafis adalah satu-satunya anak lelaki. Ketika 2001 Nafis mengenyam pendidikan dasar pada usia 6 tahun di SDN 1 Nipah kuning dan berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tahun 2007, ketika pada tahun 2007 nafis melanjutkan ke jenjang SMP dan nafis memilih SMP.I.T. Namiroh Jaya dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2010, pada tahun 2010 nafis melanjutkan ke SMA yaitu di SMAN 1 MESUJI dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2013, pada tahun 2013 nafis melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada tahun 2013 nafis melanjutkan ke perguruan tinggi dan yang menjadi pilihannya adalah UIN Raden Intan dan di terima di fakultas Ushuluddin di jurusan Pemikiran Politik Islam. Selama mengenyam pendidikan di UIN, Nafis tidak mau menjadi mahasiswa yang hanya kuliah saja sehingga dia memilih bergabung dengan organisasi baik itu intra kampus maupun ekstra dan menjadi pilihannya adalah UKM INKAI, UKM PUSKIMA, PMM, dan HMI KOMISARIAT USHULUDDIN.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat, inayah dan nikmat kemudahan dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa Skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Pemikiran Politik Islam. Keseluruhan penelitian karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, L.c, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.H.Nadirsah Hawari, L.c, M.A dan Ibu Tin Amalia FitriS.sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Drs, Effendi M.Hum selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Ellya Rosana S.Sos, M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin atas diperkenankannya penyusun meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Pengurus HMI Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan banyak memberikan bantuan selama mengadakan penelitian

Bandar Lampung, 4 Mei 2018

Peneliti,





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan penelitian.....	11
G. Manfaat penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Tinjauan Pustaka .....	16

### **BAB II. MENGENAL BERBAGAI MACAM PERSPEKTIF KADER TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM**

A. Perspektif kader terhadap partai politik islam .....	19
1. Pengertian Persepektif.....	19
B. Partai Politik.....	20
1. Pengertian Partai politik.....	20
2. Tujuan partai Politik.....	23
3. Fungsi Partai Politik.....	23
4. Peran Partai Politik.....	26

5. Partai Politik Islam di Indonesia .....	27
--	----

### **BAB III. HMI CABANG BANDAR LAMPUNG**

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung .....	56
B. HMI Cabang Bandar Lampung .....	59
C. Struktur HMI Cabang Bandar Lampung .....	64
D. Pengkaderan di HMI Cabang Bandar Lampung .....	66

### **BAB IV. PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF KADER HMI CABANG BANDAR LAMPUNG**

A. Beragam Perspektif Kader HMI Terhadap Partai politik Islam .....	68
B. Dampak Perspektif Kader HMI Terhadap Partai Politik Islam .....	71

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Partai Politik Islam dalam Persepektif Kader HMI Cabang Bandar Lampung”. Untuk mengurangi pemahaman yang salah tentang judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan judul pada kalimat-kalimat yang dianggap perlu, sebagai berikut:

Partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa sebuah kelompok yang terorganisir dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama<sup>1</sup>.

ISLAM adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci alqur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt<sup>2</sup>.

Dari berbagai pengertian tentang partai politik maka dapat diketahui bahwa “partai politik Islam” yang peneliti maksud adalah suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam (Qur'an dan Hadits ) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara. Dapat dikatakan bahwa “partai Islam” merupakan sekelompok orang yang beragama Islam kemudian membentuk sebuah organisasi politik, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2006), h.161

<sup>2</sup> <http://pilarislam.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-islam-menurut-bahasa-dan.html>  
diakses pada tanggal 20 januari 2017 pukul 08.03 wib.



- a. Partai yang menggunakan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai azas dalam menentukan visi dan misi perjuangan partai.
- b. Partai yang menggunakan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai landasan untuk kemandirian perjuangan partai
- c. Partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi dalam pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
- d. Partai yang mempunyai program perjuangan untuk Islam, umat Islam, serta kemaslahatan umat, baik lewat jalur parlementer maupun ekstra parlementer.
- e. Partai mempunyai mempunyai basis pendukung, kader, dan partisan yang keseluruhannya beragama Islam .

Ciri diatas merupakan ciri khas partai politik Islam dan yang termasuk kategori partai Islam adalah : Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perspektif adalah cara melukiskan suatu pandangan manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain.<sup>3</sup> dalam skripsi ini yang dimaksud perspektif adalah opini atau pendapat dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam tentang Partai Politik Islam<sup>4</sup>.

Kader adalah orang yang diharapkan sebagai penerus atau regenerasi dalam sebuah organisasi dan sebagai penggerak organisasi. Terlihat dalam tubuh organisasi. kader memiliki fungsi tersendiri, sebagai tenaga penggerak organisasi, sebagai benteng pertahanan organisasi. Secara kualitatif, kader mempunyai mutu, kesanggupan bekerja dan berkorban yang lebih besar daripada anggota biasa.

---

<sup>3</sup> KBBI Offline.

<sup>4</sup> <https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 11 juli 2017 jam 13.23 wib

Kader adalah anggota inti yang merupakan benteng pertahanan dari “serangan” yang berasal dari luar serta penyelewengan dari dalam. Kader adalah tenaga penggerak organisasi, yang mengerti sepenuhnya dasar atau landasan dan ideologi perjuangan.<sup>5</sup>

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah nama sebuah organisasi tertua yang berbasis Islam yang didirikan oleh beberapa mahasiswa yang di motori oleh Lafran Pane

Penulis akan meneliti mengenai partai politik Islam dalam berbagai macam perspektif kader HMI baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

1. HMI sebagai organisasi kader yang berbasis Islam dan pertama di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai azaz dan telah memberi perhatian kepada partai politik dimulai sejak kelahirannya 1947 hingga sekarang.
2. HMI Cabang Bandar Lampung sangat relevan untuk diteliti mengingat bahwa HMI lahir di Bandar Lampung itu telah lama yaitu sejak tahun 1961 hingga sekarang masih mejadi pertimbangan dan terus berkontribusi demi kemajuan Indonesia.
3. Lokasi Penelitian mudah dijangkau dan relevan dengan keilmuan program studi yang penulis tempuh yaitu Pemikiran politik Islam. Penelitian juga didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur yang memadai

---

<sup>5</sup> Agus salim Sitompul, *44 Indikator Kemunduran HMI* (Jakarta: PT Rakasta Samasta, cet-1 2005), h. 9-10.

sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

### C. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yang memakai sistem Demokrasi. Karena, partai politik memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Melalui partai politik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan. Eksistensinya bisa menjadi sarana menyalurkan aspirasi publik yang beragam.

Aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim tidak lepas dari keterikatannya terhadap syariat yang telah dituntun oleh Islam. Loyalitas dirinya seluruhnya disandarkan secara totalitas harus disandarkan kepada syara'. Tidak ada satu pun aspek kehidupan yang tidak dibahas dalam Islam, karena semuanya menyangkut aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam ruang lingkup kehidupannya, baik itu menyangkut hubungannya dengan sang pencipta, seperti masalah-masalah aqidah dan ibadah atau menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum akhlak, hukum-hukum tentang makanan, pakaian, dan lain-lain ataupun menyangkut hubungan sesama, seperti hukum-hukum muamalah dan perundang-undangan.<sup>6</sup> Semua itu harus bersumber pada kitabullah dan sunnah rasulnya sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>6</sup> M. Fachry, *Multi Partai menuju Kehidupan Islam studi kritis standarisasi partai-partai Islam*, (Jakarta: Taghyir Press, 2000, cet ke-1), h. 95-96.



وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S Al-maidaah: 48).

Ayat diatas bukan hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara peradilan, tetapi juga bagi perkara pemerintahan dan muamalat lainnya. Dan ini semua tidak dapat dilakukan tanpa adanya institusi yang menjadikan aqidah Islam sebagai asasnya. Ini dari tingkat negara. Dari tingkat kelompok, lembaga atau partai dan individu pun harus berasakan kepada aqidah Islam, sebab makna ayat diatas diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin.

Lahirnya partai Politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum agamawan pada masa kemerdekaan. Oleh sebab itu, banyak dari kalangan agamawan yang ikut terjun dalam bidang politik praktis dengan mendirikan partai

politik yang berbasis Islam seperti Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi).<sup>7</sup>

Dalam masa revolusi perhtian lebih ditujukan kepada usaha mempertahankan kemerdekaan. Keadaan rupanya berkembang sedemikian rupa sehingganya bukannya kedudukan bertambah kuat, melainkan akhirnya banyak partai memperoleh tempat saja dalam kabinet. Hai ini bertambah jelas kelihatan setelah presiden Soekarno mulai tun dalam percaturan. Bermula dari pergolakan dalam kalangan tentara di tahun 1952, kemudian sehubungan dengan pergolakan daerah. Akibat bagi kalangan Islam adalah bahwa kedudukannya tidak sekuat semula, perpecahan bertambah nyata. Kehiklasan agaknya lebih banyak tiggal dalam kata, yang berbeda dari kenyataan.<sup>8</sup>

HMI lahir dalam susasana revolusi, berselang hanya dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang berdiri sejak tahun 1947 ini dipelopori oleh Lafran Pane.<sup>9</sup> Berbicara tentang HMI, maka akan banyak peristiwa sejarah yang akan bisa di kupas, apalagi organisasi ini berdiri hanya terpaut 2 tahun dari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Maka sudah barang pasti kita analogikan bagai dua sisi mata uang antara sejarah Republik Indonesia dengan sejarah HMI.

Sebagai organisasi yang berusia lebih dari setengah abad, banyak periode sejarah yang telah dilalui HMI. Semua ini menjadi catatan, pengalaman, dan

<sup>7</sup> Inu kencana syafii'e, *Al-Qur'an dan Ilmu politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 229.

<sup>8</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000 cet ke-2), h. 209.

<sup>9</sup> Para pendiri HMI lainnya adalah Karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Maisaroh Hilal, Soewali, Yusdi Gozali, Mansyur, Lebih lanjut lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan*, Op.Cit, h. 25.

pelajaran yang memperkaya gerak organisasi dalam pengabdianya terhadap umat dan bangsa, terhadap tuhan tentunya. Secara keseluruhan, sejarah perjalanan HMI dapat diceritakan dalam tujuh fase yang didalamnya terdapat berbagai even (internal dan eksternal) yang mempengaruhi gerakan langkah organisasi:

1. Fase Pengukuhan (5 Februari-30 November 1947)
2. Fase Perjuangan Bersenjata (1947-1949)
3. Fase Pertumbuhan dan Pembangunan HMI (1950-1963)
4. Fase Tantangan (1964-1965)
5. Fase Kebangkitan Orde Baru dan Angkatan 66 (1966-1968)
6. Fase Pembangunan Nasional dan Reformasi(1969-1998)
7. Fase Reformasi dan Tantangan Global (1998-sekarang)

HMI lahir ditengah zaman dimana energi dan psikologi umat Islam terkuras untuk mempertahankan kemerdekaan. Pejajahan, misionaris, dan pendidikan sekuler ala Belanda telah mendegradasi iman rakyat Indonesia. Kebodohan dan perpecahan kelompok keagamaan juga memperparah kondisi bangsa yang sedang dililit kemiskinan. Paham komunis pun mulai mengakar dan terorganisir sampai ke kampus-kampus. Untuk merespon ini HMI dilahirkan:

- a. Mempertegak dan mengembangkan agama Islam
- b. Mempertinggi derajat rakyat dan Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Ketika dikukuhkan, organisasi-organisasi mahasiswa beraliran sekuler, sosialis dan komunis menjadi was-was karena merasa HMI akan menjadi lawan. Dua tahun kemudian, pada 20 juli 1947, belanda kembali melakukan agresinya setelah menginjak-injak “perjanjian linggarjati.” Anggggota-anggota HMI ikut memanggul senjata. Agresi ini berakhir dengan “Perjanjian Renville” pada 17 Januari 1948. Pada saat yang sama komunis mulai menguasai pemerintahan Mr.

---

<sup>10</sup> A.D Ranuwiharjo, 20008. *Misi HMI Mencetak Hamba-Hambah Allah, paripurna Kader-Kader Bangsa*”artikel pada harian Pelita, Jakarta: 5 Februari 1988, dikutip dalam *HMI mengayuh anantara Cita dan Kritik*, A. Sitompul (ed), mizaka galiza: jakarta.



Amir Syarifuddin, walaupun kemudian pemerintahan ini dapat berhasil digulingkan mengecewakan kelompok-kelompok komunis seperti FDR (Front Demokrasi Rakyat). Kemudian mereka kembali menyusun kekuatan, melakukan fitnah, dan provokasi. Muso dan Suripno dari Soviet pada Agustus 1948 memperkuat gerakan PKI. Merasa sudah kuat, mereka melakukan pemberontakan pada 18 September 1948 di Madiun. HMI ikut membentuk Corps Mahasiswa (CM) dan terlibat dalam aksi inteleijen dan unit tempur untuk peggayaan PKI. Dalam kondisi lemah ini, Indonesia kembali diserang Belanda melalui agresi II pada 19 Desember 1948. Pada masa ini, anggota-anggota HMI dikerahkan ke gunung-gunung untuk membantu perang gerilya. Akhirnya pada konferensi Meja Bundar (KMB) November 1949 di Den Haag Belanda benar-benar mengakui kedaulatan Indonesia.

Selama revolusi fisik ini sempat terjadi kevakuman di tubuh organisasi kemahasiswaan. Paska perang, sisa-sisa anggota HMI kembali ke kampus, ada juga yang meneruskan karir di kemiliteran seperti Letjen Achmad Tirta Sudiro dan Mayjen Hartono. Sejalan pindahnya Ibukota dari Yogyakarta pada Agustus 17 1950, PB HMI juga dipindahkan oleh Lafran ke Jakarta. Pada periode ini sampai tahun 1963 HMI kembali menata pertumbuhan dan pembangunan organisasinya.

Fase 1964-1965 kembali terjadi ketegangan ideologis dengan komunis. Gagal di “Madiun Affair” pada 1948, PKI kembali menyusun strategi untuk kudeta. Sejak 1960 mereka mulai menyusup ke aparat pemerintahan. PKI mendapat angin segar melalui MANIPOL-USDEK NASAKOM (Manifesto Politik, UUD, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin,

Kepribadian Indonesia: Nasionalis, Agamis, Komunis) yang digagas Sukarno pada 1960. Dendam dengan HMI belum selesai. Menyadari Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu musuh besarnya, melalui *underbow*-nya seperti Konsentrasi Gabungan Mahasiswa Indonesia (CGMI), mereka mulai menyerang, memfitnah, dan menuntut pembubaran HMI baik secara tertutup maupun terbuka.<sup>11</sup>

Ketika pada tahun 1955, pada pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan dan dianggap sebagai pemilihan yang paling idealis dimana ada pertarungan beberapa ideologi yaitu antara Islam, Nasionalis, dan Komunis. Terkait permasalahan tersebut kader HMI banyak menuangkan suaranya kepada partai Islam hal tersebut disebabkan adanya PKI yang beraliran komunis untuk mengantisipasi agar komunis tidak memenangkan pemilihan tersebut maka PB HMI mengeluarkan pernyataan agar kader HMI dan umat Islam menjatuhkan pilihannya kepada partai-partai berbasis Islam. Kebijakan politik yang diambil HMI pada waktu itu memperlihatkan pola gerakan HMI yang cenderung menonjolkan sifat independensi etisnya.

Sebagaimana hasil pra survei yang penulis lakukan terhadap beberapa kader HMI mengenai Partai Politik Islam, seperti pendapat dari Krismanik sebagai pengurus dari HMI komisariat Syari'ah berpendapat :

*Partai politik Islam merupakan sebuah partai yang secara ideologi selain menerapkan pancasila juga menekankan keIslamannya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja partai Islam sangat dibutuhkan untuk menampung aspirasi dari umat Islam.*

---

<sup>11</sup> Said Muniruddin, *Bintang Arasy Tafsir Filosofis Gnostik Tujuan HMI*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2014, cet ke-1), h.27-28.

Nuzul Irsan sebagai ketua umum dari HMI komisariat teknik UNILA berpendapat :

*Pendapat positif akan adanya partai parpol Islam. Setiap kegiatan yang kita lakukan tidak bisa dilepaskan dengan aturan Islam.*

Wahyunita Sari juga menyatakan :

*Parpol Islam belum sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun sudah bagus tapi belum konsisten.*

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwasanya kader HMI mendukung akan adanya partai Politik Islam karena di era demokrasi partai adalah sarana untuk dapat menerapkan kebijakan.

Namun ketika disinggung masalah maraknya kasus korupsi yang terjadi, mereka berpendapat sangat menolak partai-partai yang menggunakan kekuasaan serta kebijakannya melakukan tindakan korupsi serta merugikan masyarakat banyak. Namun, ketika disampaikan kepada para kader HMI apakah mereka masih mempunyai simpati terhadap Partai Politik Islam yang telah melakukan tindakan Korupsi, tanggapan nya berbeda, Ada yang tetap mendukung partai tersebut, dan ada pula yang menyatakan tidak tertarik lagi dengan Partai Politik Islam tersebut.

Keadaan demikian menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian Ilmiah, terlebih lagi setelah pemilu tahun 1971 pengurus PB HMI tidak lagi meminta kader nya untuk memilih partai Politik Islam. Dan kader dibebaskan memilih Partai yang dia sukai. Berangkat dari permasalahan banyaknya kasus yang terjadi di sekitar oknum elit Partai Politik Islam, penulis

merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partai Politik Islam dalam perspektif Kader HMI Cabang Bandar Lampung, yang kemudian disusun dalam bentuk Skripsi.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perspektif Kader HMI Cabang Bandar Lampung terhadap Partai Politik Islam?
2. Bagaimana Dampak Perspektif Kader HMI Terhadap Partai Politik Islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Perspektif Kader HMI Cabang Bandar Lampung Terhadap Partai Politik Islam.
2. Mengetahui Dampak Perspektif Kader HMI Terhadap Partai Politik Islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis: hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik Islam, terutama oleh mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Praktis: yaitu agar dijadikan referensi tambahan terkait pemikiran politik Islam. Dan penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat

dikembangkan lebih lanjut dalam upaya menggali dan mengkritisi partai Politik Islam serta menjadi Evaluasi bagi partai Politik Islam di Indonesia.

### **G. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi mengenai tanggapan-tanggapan mahasiswa yang menjadi kader HMI terhadap Partai politik Islam
2. Memberikan sedikit gambaran tentang hal-hal yang mempengaruhi Perspektif Kader HMI terhadap partai Politik Islam.

### **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode yang sesuai dalam penelitian agar terciptanya tulisan yang ilmiah dan tersusun secara sistematis, sebagaimana berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), h. 20.

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Penghantar Metode Research Sosial*,(Bandung: Mandar Maju,1996), h.32



### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi obyektif dilapangan.<sup>14</sup> jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat.

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang partai Politik Islam menurut pandangan Mahasiswa yang telah tergabung di HMI Cabang Bandar Lampung. Baik yang telah mengikuti latihan kader 1(*Basic Training*), latihan kader 2 (*Intermediate Training*) maupun pengurus HMI yang ada di Bandar Lampung.

## **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

### **a. Data Primer**

Abdurrahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang pertama.<sup>15</sup> Sumber data Primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview atau wawancara. Seperti kejadian dilapangan yang berhubungan dengan tanggapan mahasiswa yang tergabung di HMI Cabang Bandar Lampung dalam penelitian ini. Peneliti mengambil beberapa orang pengurus Cabang HMI yaitu Khoirul Anam selaku sekretaris Cabang, Abu Rizal Bakri, Iin Tajudin, dan beberapa orang pengurus komisariat baik itu ketua umum,

---

<sup>14</sup> Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999), h. 60

<sup>15</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 38

sekretaris umum, atau kepala bidang yang mengetahui dan mengerti tentang Partai Politik serta mempunyai pengaruh terhadap kader.

### **b. Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah telah ada. Seperti buku-buku, jurnal dan karya Ilmiah lain yang berkenaan dengan HMI dan Partai Politik Islam, serta dokumentasi HMI Cabang Bandar Lampung.<sup>16</sup> Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang dialapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## **3. Alat pengumpulan Data**

### **a. Metode Observasi**

Metode observasi merupakan metode pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.<sup>17</sup> Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Di samping itu juga dapat menyaring data yang tidak obyektif dari data yang dikemukakan oleh narasumber melalui wawancara.

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). H. 81.

### **b. Metode wawancara (Interview)**

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>18</sup>

Wawancara berencana adalah model wawancara yang biasanya daftar pertanyaan (quesioner) telah disiapkan sebelumnya dan disusun secara sistematis. Kuisisioner yang terstruktur dan sistematis ini kemudian oleh pewawancara ditanyakan kepada responden dengan cara membacakannya kepada responden untuk dijawab. Semua responden yang terpilih diajukan kuisisioner yang sama, kata-kata sama dengan pola dan sistematika yang seragam.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mendapatkan data tambahan selain dokumentasi. dalam hal ini yang diwawancarai adalah 1 pengurus dari HMI Komisariat pertanian yaitu Nuzul Irzan selaku ketua umum, 1 orang pengurus komisariat sospol yaitu Anam sebagai ketua umum, yang mewakili perguruan tinggi unila, 1 orang pengurus kom ushuluddin Edi Suryanto selaku sekretaris umum HMI komisariat Ushuluddin, 1 orang pengurus syariah perwakilan dari koorkom UIN RIL, dan 1 orang pengurus Hukum UBL yaitu Iqbal Syahbanu sebagai perwakilan dari koorkom swasta dan 3 pengurus Cabang yaitu khoirul Anam, Abu Rizal dan In Tajudin.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research; jilid 2* (yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 218.

<sup>19</sup> Bagong suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 77.

### c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya<sup>20</sup>

Metode dokumentasi ini dipakai sebagai metode pelengkap dari metode interview/wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen dan ada hubungannya dengan penelitian.

## 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, makalangkah selanjutnya menghimpun dan mengolah data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

Penulis menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik kesimpulan akhir. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi atau secara universal”.

## I. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah merupakan bagian dari suatu skripsi yang bersifat sentral. Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah bagian dari skripsi

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981), h. 93.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993), h. 132.

yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian, tujuan penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>22</sup>

1. Skripsi karya Mursyid Aghnia Silmi Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung yang membahas tentang gaya kepemimpinan ketua umum HMI komisariat dakwah IAIN Raden Intan Lampung dalam meningkatkan prestasi akademik kader yang menjadi fokus permasalahan nya adalah gaya kepemimpinan HMI komisariat dakwah dalam meningkatkan prestasi akademik kader.
2. Skripsi karya Syaefuddin Ahrom Al Ayyubi dari UIN Kalijaga yang membahas tentang peran kaderisasi organisasi ekstra kampus dalam meningkatkan interaksi sosial dan kepemimpinan mahasiswa (studi kasus pada PMII, HMI, dan KAMMI di UIN Sunan kalijaga) dimana yang menjadi fokus permasalahan nya adalah bagaimana pola kaderisasi yang ada di PMII, HMI dan KAMMI dalam meningkatkan interaksi sosial dan kepemimpinan di UIN Sunan Kalijaga.
3. Skripsi karya Ragil Armando yang berjudul dinamika HMI dan KAMMI di kota Denpasar 1990-2014 (kajian tentang pola ideologi gerakan mahasiswa Islam) dimana yang menajadi pembahasannya adalah tentang bagaimana latar belakang terbentuknya gerakan pemuda Islam di kota Denpasar, sepak terjang dan kontribusi gerakan mahasiswa Islam khususnya HMI dan KAMMI dalam

---

<sup>22</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Cet. 1, h. 236.



pembangunan nasional dan kota Denpasar, serta pola ideologi yang membentuk karakter HMI dan KAMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam.

4. Skripsi karya Dwi Wahyuni dari universitas Raden Fattah Palembang yang berjudul peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia (Analisis terhadap nilai-nilai dasar perjuangan HMI) dimana yang menjadi fokus nya adalah peranan HMI dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dan aspek-aspek yang terdapat dalam nilai-nilai dasar perjuangan.
5. Skripsi karya Novia Ainun Baroroh dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul peran budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi di HMI Cabang Malang dimana yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana efektivitas organisasi di HMI Cabang kota Malang, bagaimana tingkat budaya organisasi di HMI Cabang Kota Malang dan bagaimana peran budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi di HMI Cabang Kota Malang.

Dari tinjauan pustaka tersebut bahwasanya telah ada yang pernah melakukan penelitian tentang Organisasi Mahasiswa tetapi itu semua adanya di luar Fakultas Ushuluddin. dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah bahwa penelitian ini membahas atau mengkaji tentang Respon kader HMI Cabang Bandar Lampung terhadap Partai Politik Islam. baik yang responnya bernilai positif maupun bersifat negatif.

## BAB II

### MENGENAL BERBAGAI MACAM PERSPEKTIF KADER

### TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM

#### A. Perspektif Kader Terhadap Partai Politik Islam

##### 1. Pengertian Perspektif

Manusia sejak diciptakan lebih sempurna daripada makhluk ciptaan lainnya perbedaan itu tidak hanya dari penampilan fisiknya saja (jasmani), manusia memiliki akal perasaan dan panca indra. Dengan potensi itulah manusia dapat menangkap rangsangan dan mengenal dunia luar sehingga mampu mengetahui dirinya sendiri dan menilai stimulus yang ditangkapnya dan melakukan penyesuaian terhadap keadaan sekitarnya yang mana hal ini berkaitan dengan perspektif (*persepction*).

Perspektif adalah inti komunikasi, John R. Wenburg menjelaskan bahwa perspektif merupakan cara organisme memberi arti.<sup>1</sup> Rudolf F Verbeder, mengatakan bahwasanya persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi.

Perspektif meliputi alat indera (sensasi) melalui alat-alat indera kita (yakni indera peraba, indera penglihatan, indera penciuman, indera pengecap, dan indera pendengar), atensi, dan interpretasi. merujuk pada rasa dan pesan yang dikirimkan oleh otak lewat indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Reseptor inderawi mata, telinga, kulit dan otot, hidung dan lidah adalah penghubung dari otak manusia dan lingkungan sekitar. Mata merespon terhadap gelombang cahaya, telinga serta terhadap gelombang

---

<sup>1</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 168.

suara, kulit terhadap temperatur, dan tekanan, hidung terhadap bau-bauan dan lidah terhadap rasa. Lalu rangsangan dikirim ke otak.

Perspektif terdiri dari tiga aktivitas, yaitu: seleksi, organisasi, dan interpretasi. Yang dimaksud dengan seleksi sebenarnya mencakup sensasi dan atensi, sedangkan organisasi melekat pada interpretasi, yang dapat didefinisikan. Sebagai meletakkan suatu rangsangan bersama rangsangan lainnya sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Kalimat persepsi itu hanya menggambarkan apa yang kita lihat, dengar, cicipi, atau sentuh. Kemampuan orang berbeda-beda dalam mengindra lingkungannya, karena juga mereka berbeda-beda secara genetis, berbeda pengalamandan pembelajarannya, atau karena sebagian alat inderanya kurang berfungsi sesuai usia tua atau disebabkan kecelakaan.

## **B. Partai Politik**

### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai dan politik itu dasarnya adalah dua kata berasingan dan masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Partai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai satu organisasi sosial, dan politik merupakan upaya seseorang atau segolongan orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan. Ketika keduanya digabung dalam satu kalimat menjadi partai politik maknanya menjadi lain.

Dalam Al-Qur'an istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna; **Pertama**, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. **Kedua**, kumpulan yang memiliki

kekuatan dan persaudaraan. **Ketiga**, kader serta partisipasinya.<sup>2</sup> Mengikuti pengertian istilah, partai *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, arah sasaran dan tujuan yang sama.<sup>3</sup> Perkataan *hizb* terdapat beberapa kali dalam Al-Qur'an, antaranya;

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. (Q.S. Al-Ahzab 33; 22).

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang. (Q.S Al-Maidah 5;56).

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Faathir 35;6).

أَسْتَحْذَرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٨﴾

<sup>2</sup> Almu.jam al-wasith, 1/70.

<sup>3</sup> Muhammad Imarah, *ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharabi wal Islami*, (Kairo:Nahdhah Mishr,1419), h. 184

syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syaitan. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya golongan syaitan Itulah golongan yang merugi.(Q.S Al-Mujadalah 58;19).

Terminologi partai (*hizb*) dalam dasar-dasar Islam (Al-Qur‘an dan Al-Sunnah) begitu pula dalam pengalaman Negara Islam pertama, pada periode Rasulullah saw, tidak ditolak secara mutlak dan tidak pula secara mutlak diterima karena alasan istilah partai itu sendiri. Tetapi hal yang menjadi ukuran penerimaan istilah partai (*hizb*), kemudian istilah berpartai (*tahazzub*) dan organisasi kepartaian (*at-tanzhim al-hizbi*), adalah muatan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip yang menjadi asas partai ini. Sebab kemusyrikan dan kaum musyrikin adalah sebuah partai, akan tetapi partai ini tertolak dan dikecam, para penolong setan adalah partai akan tetapi dikecam dan ditolak. Sedangkan para pembela Allah (*auliya‘ Allah*) adalah satu partai yang diterima dan mendapat pujian. Begitu pula kaum mukminin, para pembela Rasulullah saw (*anshar ar-Rasul*) mereka adalah partai Allah (*Hizbullah*) yang bergabung dalam jihad untuk membela agama.<sup>4</sup>

Politik sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, sebut saja pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles, hingga para pemikir dan ilmuwan politik terkini, walaupun pada generasi akhir ini, secara ideologis banyak dipengaruhi ideology *liberalisme*, *marxisme*, *nasionalisme*, *sosialisme*, dan lain sebagainya termasuk Islam. Istilah “Politik”, pertama kali dikenal dalam buku “*republic (politea)*” yang dikarang oleh Plato (347 SM), kemudian muncul karya Aristoteles (332 SM) menamakan bukunya *politikon*.

Melihat kenyataan bahwa politik adalah cara untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, maka dalam prakteknya partai politik digunakan sebagai

---

<sup>4</sup> M. Sidi Ritaudin, *Benturan Politik Antara Idealisme dan Pragmatisme* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2012), h. 151.



kendaraan yang dipakai untuk mewujudkannya. Karena politik sangat terkait dengan kepemimpinan, dan dengan kepemimpinan lah pengendalian dapat dilakukan, untuk itu perlu adanya sebuah partai.

Tidak ubahnya seperti organisasi lain adanya partai politik mempunyai tujuan sendiri dimana gunanya mensejahterakan masyarakat serta agar partai tidak kehilangan arah.

## 2. Tujuan Partai Politik

Tujuan adanya Partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan serta mewujudkan program-program yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan ideology tertentu.

## 3. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiarto dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik, fungsi partai politik ada empat, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen atau perekrutan politik dan pengelolaan konflik.

### a) Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat atau aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak menyilang pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*).

Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di lain pihak partai politik berfungsi

juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas kebawah dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan pemerintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

#### **b) Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik**

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan proses melalui mana seseorang memperoleh sikap an orientasi terhadap phenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Bisanya proses sosialisasi beerjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut.

Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

**c) Partai Politik sebagai sarana rekrutmen atau pengerahan politik**

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik atau mewakili parpol itu dalam suatu bidang, rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

**d) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik**

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian pemikiran atau adanya pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog atau berdiskusi, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD) untuk mendapatkan keputusan mengenai permasalahan.

**4. Peran Partai Politik**

Organisasi yang berperan dalam proses formulasi kepentingan antara lain adalah sektor perantara (*'intermediary sector'*) dan masyarakat madani (*'civil society'*). Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan sistem politik mereka. Contohnya adalah kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, kelompok inisiatif warga dan organisasi keagamaan. Sedangkan dalam masyarakat madani muncul berbagai macam inisiatif yang berkisar pada tujuan dan masalah tertentu seperti lingkungan hidup, hak azasi manusia, gender, dan lain-lain. Salah satu perbedaan antara kelompok kepentingan dan masyarakat madani adalah bahwasanya kelompok kepentingan hanya melayani kepentingan klien. Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan parpol di posisi pusat (*'political centrality'*). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan *platform* pemilu. Diharapkan *platform* tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mem-pengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu.

2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

## 5. Partai Politik Islam di Indonesia

### a) Landasan berdirinya Partai Politik Islam

#### Partai Politik Islam Sebagai Sebuah Dasar

Berdasarkan kajian terhadap sumber ajaran Islam al-Qur'an dan sunnah, setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan (*the scheme of life*) yang sangat jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.

Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam. Agaknya akan lebih memperjelas masalah dengan mengutip ungkapan yang ditulis oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, bahwa bukan hanya *a system of theology*, lebih dari itu. Islam merupakan *a complete civilization*. Dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan.<sup>5</sup> Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (syariat) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangannya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.<sup>6</sup> Muhammad Asad

---

<sup>5</sup>Dikutip dari Nasir Tamara, "Sejarah Politik Islam Orde Baru", dalam *Prisma*, No. 5 Thn. XVII, 1988, h. 1.

<sup>6</sup>Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952), h. 174. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 62.



berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan cita-cita itu memerlukan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Sebab disadari sekali bahwa perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Prinsip ini diyakini benar oleh umat Islam sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar akan dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.

Para pemimpin umat Islam yang tergabung dalam berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan yang tetap dilandasi benang merah Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sebagai suatu bangsa yang majemuk, bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada dataran perbedaan keyakinan dan agama tentu menimbulkan berbagai perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara ini. Akibatnya yang tidak dapat dihindarkan tentu munculnya berbagai pergumulan antara sesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama. Bagi umat Islam, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan ajaran Islam, dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pemimpin Islam di

---

<sup>7</sup>Amin Rais, *Cakrawala Islam...*, h. 52; Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 139-140

Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.

Berakhirnya masa penjajahan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaksud dalam konstitusi negara.

#### b) **Landasan Filosofis Berdirinya Partai Politik Islam di Indonesia**

Teori politik Islam harus bertolak dari kaidah-kaidah umum, yakni kebebasan, kesetaraan, keadilan dan supremasi hukum juga konsistensi terhadap prinsip pemilihan pemimpin, bahwa pemerintah adalah pelaksana hukum dan perundang-undangan, pelindung agama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Diantara hak rakyat adalah memberi nasehat, mengevaluasi memecat dan menggantinya jika diperlukan. Sistem politik harus tegak diatas prinsip syuro, dan syuro menjadi sesuatu yang harus di tegakkan oleh penguasa.

Sistem politik Islam harus memuat persepsi yang jelas tentang kebebasan politik, aktifitas politik, partai politik, kritik politik, kebebasan pers, kedudukan wanita, sistem sosial, ekonomi, pemerataan, kelayakan, independensi peradilan.<sup>8</sup> Jika demikian maka perlu juga diketahui beberapa hal yang menjadi landasan filosofis berdirinya partai Islam, yaitu :

- a. Kenyataan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi yaitu: memelihara,

---

<sup>8</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, jilid III, h. 20

mengatur dan memakmurkan bumi yang merupakan aktifitas politik yang paling otentik.

b. Universalitas Islam telah menjadi inti pemhaman kaum muslimin terhadap konsep-konsep Islam dalam seluruh dimensinya. “Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek, Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dn keadilan, kebudayaan dan perundang- undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikroh, akidah yang lurus dan ibadah yang benar-benar keuniversalan itu sebagai inti dan pokok-pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalaha suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara, dan masyarakat.”<sup>9</sup>

Selain itu sistim Politik apabila dikaitkan dengan negara maka sistim politik adalah sebuah konsep yang diterapkan pada situasi konkrit seperti negara. Menurut Miriam Budiarjo sistim politik ini berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu aspek penting dalam sistim politik adalah budaya politik (Political culture) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti; norma-norma, pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

---

<sup>9</sup>Nur Mahmudi Isma’il, M. SC, *Memilih Partai (visi, misi dan persepsi)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 34

<sup>10</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta : cet-XIX, 1993, h. 47

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat politik di pengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistim, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya. Umumnya dianggap bahwa dalam sistim politik terdapat empat variabel:

1. Kekuasaan ; sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
2. Kepentingan ; tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
3. Kebijakan ; hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan Budaya politik ; orientasi subyektif dari individu terhadap sistim politik.<sup>11</sup>

Perjalanan Partai Politik Indonesia dari masa ke masa tidak pernah bisa dilepaskan dari peran politik yang dimainkan oleh Umat Islam, Dalam Sejarahnya Umat Islam Indonesia Telah Banyak Memberikan Kontribusi bagi arah pembangunan politik dan demokrasi. Turut Sertanya Umat Islam Dalam Kehidupan Politik Telah Menjadikan Panggung Politik Nasional Bergerak cukup dinamis.

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia disinyalir sebagai bentuk dari keinginan formaliasi Islam di Indonesia. Wawasan politik kaum awam yang masih

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

bercorak paternalistik di satu pihak, serta kepentingan melihat politik sebagai pemenuhan kebutuhan sesaat di pihak lain, merupakan kendala yang tidak kecil. Soal politik bukan sekadar soal menyalurkan aspirasi untuk menegakkan kepemimpinan negara (*Imamah*) semata, tapi soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Penelusuran terhadap sejarah perpolitikan di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga dapat digunakan untuk mengungkap perjalanan perubahan sistem politik umat Islam di Indonesia. Berpikir secara dialektis akan terlihat perjalanan sejarah sebagai sesuatu yang mapan dan mendapat reaksi hingga pada akhirnya melahirkan sintesa baru. Pendekatan ini tentu dapat digunakan untuk mengamati perjalanan sejarah partai politik Islam dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Keberadaan umat Islam di negara ini sering menjadi bahan pembicaraan dan peranannya pun mengalami pasang surut. Ia pasang hampir pada setiap permulaan babak baru, tetapi pada umumnya kemudian surut.

Islam sebagai salah satu agama yang dianut oleh banyak rakyat Indonesia memainkan peranan penting dalam perpolitikan di Indonesia. Tetapi, banyaknya parpol-parpol Islam di Indonesia memberikan banyak masalah dan tantangan yang dihadapi oleh partai-politik Islam tersebut. Sistem Politik Islam itu didasarkan atas 3 (tiga) prinsip, yakni Tahuid (kemaha Esaan Tuhan), Risalah (kerasulan Muhammad) dan khalifah.<sup>12</sup> Tahuid berarti hanya Tuhan yang Maha Esa sajalah pencipta pemelihara, dan penguasa dari seluruh alam (universum dan segala yang terdapat di dalamnya baik organis maupun inorganis. Kedaulatan ini hanya

---

<sup>12</sup> Abdul Ala' Al maududi, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: GIP, 2001), h. 4

terletak padanya. Dia sajalah yang berhak untuk memberi perintah atau melarang. Pengabdian (ibadah) dan ketaatan hanya kepada-Nya, tiada pihak manapun yang berhak dalam taraf bentuk apapun. Risalah, Rasulullah sesuai maksud dari kitabullah itu, telah menegakkan bagi kita salah satu pola dari sistem hidup dalam Islam dengan melaksanakan hukum Islam itu dan memberikan dalam praktik dengan detail (secara rinci) yang diperlukan. Kombinasi kedua dinamakan *syariah*. Sistem yang dibangun oleh Rasulullah saw. Kaum mukminin yang hidup bersama beliau dimadinah jika dilihat dari segi praktis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah politik *par excellence*.<sup>13</sup>



Lahirnya Partai politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum agamawan pada masa kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak dari kalangan agamawan yang ikut terjun berpolitik praktis dengan mendirikan partai politik yang berbasis Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Majelis Syura Indonesia (Masyumi).

Menurut Dr. Zuly Qodir,<sup>14</sup> membicarakan relasi umat Islam dengan politik memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat penduduk Indonesia dari total 237 juta jiwa sebesar 86,7 % mayoritas beragama Islam, maka secara politik dan sosiologis fakta tersebut sangat penting untuk diperhatikan, serta menjadi sesuatu yang relevan sebagai objek kajian.

---

<sup>13</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat "sejarah, Filsafat, Ideologi, dan pengaruhnya terhadap Dunia ke-3"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 302

<sup>14</sup> Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 151.



Relasi umat Islam dengan politik merupakan sebuah konsekuensi logis dari diterapkannya sistem demokrasi di republik ini, meskipun sikap umat Islam dalam memandang hubungan Islam dengan politik (demokrasi) tersebut tidak seragam. Umumnya terdapat tiga varian besar pandangan umat Islam mengenai relasi Islam dengan politik.

Mengutip Munawir Sjadzali,<sup>15</sup> ada tiga aliran besar melihat peta hubungan antara Islam dengan politik (demokrasi). *Pertama*, Islam formalis, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang sempurna (*syamil*) dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara.

Aliran Islam ini memiliki keyakinan, bahwa Islam memiliki seperangkat sistem politik (*siyasa*) tersendiri yang berbeda dengan demokrasi (barat), dari pemahaman keberagamaan tersebut, aliran Islam ini memperjuangkan formalisme agama Islam menjadi dasar dalam bernegara. *Kedua*, Islam liberal, aliran yang berpandangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak memiliki seperangkat konsep kenegaraan, Islam ditempatkan sebatas agama yang hanya mengatur aspek spiritual setiap penganutnya, aliran ini menyakini bahwa Islam tidak boleh ikut campur tangan mengurus masalah kenegaraan.

Aliran ini menolak formalisme Islam ke dalam kehidupan kenegaraan. *Ketiga*, Islam substansi, aliran yang menolak pandangan Islam agama serba lengkap, juga menolak Islam tidak memiliki nilai etik politik kenegaraan, aliran

---

<sup>15</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi : Pemikiran Nurcholish Madjid*. (Jakarta : Penerbit Republika, 2004), h. 73.

terakhir ini menjadi sintesis dari kedua aliran sebelumnya, mereka yang menganut aliran ketiga ini memiliki pandangan bahwa Islam menyediakan pandangan-pandangan etis bagi pengaturan masyarakat dan negara, tetapi yang menarik aliran ini menolak formalisme Islam, cukup nilai-nilai substansi Islam tentang keadilan, kesejahteraan dan demokrasi menjadi prioritas utama dalam bernegara.

Indonesia dapat dikenal setidaknya 2 (dua) Orde sebelum akhirnya masuk pada masa Era Reformasi yaitu Orde lama (ORLA yang dipimpin oleh Soekarno) dan Orde baru (ORBA yang dipimpin oleh Soeharto). Setiap orde mempunyai karakteristik serta bahasa politik tertentu. Apa yang terjadi di Eropa pasca Renaisains adalah sebuah perubahan-perubahan radikal yang terjadi dari apa-apa yang berasal dari masa-masa sebelumnya. Bahasa-bahasa politis sebelumnya mengandung makna risih untuk didengar selanjutnya menjadi sebuah hal yang wajar bahkan telah menjadi sebuah kebiasaan.

Partai Politik di Indonesia mulai muncul pada masa kolonial Belanda, sebagai pencetus bangkitnya kesadaran Nasional. Banyak lahir gerakan-gerakan/ organisasi-organisasi yang bertujuan hanya sekedar gerakan sosial dan pendidikan, seperti Budi Oetomo (1908) dan Muhammadiyah (1912), atau bentuk organisasi dengan asas politik dan agama yaitu Sarikat Islam (1911) dan partai katolik, ataupun bentuk organisasi dengan asas politik yaitu PNI (1927) kesemuanya sangat besar peranannya dalam perkembangan pergerakan Nasional Indonesia.

Lain halnya ketika masa penjajahan Jepang, semua kegiatan politik dilarang. Justru golongan umat Islam yang diperbolehkan mendirikan partai, maka

lahirlah masyumi. Akan tetapi pada awal kemerdekaan, setelah keluarnya Maklumat pemerintah tanggal 4 November 1945 yang memperbolehkan berdirinya partai-partai politik, Umat Islam merespon maklumat tersebut dengan mendirikan partai politik Masyumi.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, Islam dan umatnya telah menunjukkan peranannya yang sangat signifikan dalam usaha membebaskan bangsa ini dari Imperialisme Eropa. Peranan politik umat Islam telah dilakukan jauh sebelum Indonesia menjadi bangsa merdeka, kita mengetahui para Kiai dan Ulama pada awal decade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (masyarakat pribumi).

Kelahiran Sarikat Dagang Islam (SDI) yang dipelopori oleh kelompok kecil umat Islam di antaranya Tamar Djaja dan Samanhoedi pada 16 Oktober 1905 yang disusul oleh Sarikat Islam (SI) berdiri pada tanggal 11 November 1912 merupakan bentuk kebangkitan bangsa terhadap kekuasaan pemerintahan koloni Belanda. Pendiri SDI adalah Kiai Haji Samanhoedi menyerukan kesatuan di kalangan umat Islam. Antara SDI dan SI merupakan rangkaian dari gerakan Islam, dan pada 1930 SI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) hingga menjadi kekuatan politik tersendiri pasca-Indonesia merdeka dengan nama PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), meskipun umat Islam sempat bersatu dalam satu wadah politik setelah kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang berhasil menyepakati Masyumi sebagai satu-satunya partai politik umat Islam, tetapi tahun 1947, PSII berdiri sebagai partai tersendiri barangkali partai ini merasa sebagai partai yang telah eksis sebelum kemerdekaan dan partai tertua di kalangan Islam.

Pandangan SI mengenai politik sangat jelas, bahwa “agama, politik dan peri kehidupan (ekonomi) itu sudah serangkai, sikap politik seperti ini, umum dipakai oleh para aktivis gerakan Islam dan partai politik Islam yang melihat bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif, agama yang telah lengkap dan sempurna mengatur kehidupan umat manusia.

Karena itu konstruksi hukum dalam negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ketika di dalam SI sendiri muncul dasar-dasar yang bukan Islam yang kemudian melemahkan perjuangan partai, SI menganggap, umat Islam tidak perlu lagi mencari berbagai paham atau isme-isme lain yang dapat mengobati pergerakan mereka. Dalam Islam telah ada dasar perjuangan yang kekal, bahwa segala kebajikan yang ada dalam suatu isme, ada dalam azas Islamisme itu.

Perilaku menindas dan mengeksploitasi, seperti yang dilakukan oleh belanda kepada penduduk Indonesia, dalam pandangan politik sarekat Islam merupakan sesuatu yang bertentangan dengan misi besar Islam dan misi kemanusiaan, sebab misi kemanusiaan adalah bagaimana mencapai kebahagiaan dan keselamatan kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti.

Sebelum diadakannya amandemen UUD 1945, ketika diadakannya pemilihan umum untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1955, banyak sekali terdapat partai politik yang mengikuti pemilihan umum di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi)
3. Nahdlatul Ulama (NU)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
7. Partai Katholik
8. Partai Soisialis Indonesia (PSI)
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
10. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
11. PRN
12. Partai Buruh
13. GPPS
14. PRI
15. PPPPRI
16. Partai Murba
17. Baperki
18. PIR Wongsogoro
19. Gerindra
20. Permai
21. Persatun Daya
22. PIR Hazarian
23. PPTI
24. AKUI
25. PRD
26. PRIM
27. Acoma
28. Partai R. Soedjono Prawiro Soedarmo.<sup>16</sup>
- 29.

Namun dari hasil pemilihan umum tahun 1955 tersebut, hanya terdapat empat partai saja yang dinyatakan sebagai pemenang, yaitu sebagai berikut :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi)
3. Nahdlatul Ulama (NU)
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Keberhasilan partai-partai Islam dalam pemilihan Umum pertama tahun 1955 membuktikan bahwa partai-partai Islam telah berhasil memikat hati sebagian besar rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dikarenakan beragamnya azas partai politik tersebut. Setelah peilihan umum ini partai-partai politik merasa mempunyai legalitas dan memperoleh kekuasaan politik secara formal.

---

<sup>16</sup> Inu kencana Syafiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 227-228.

Namun kelemahan partai-partai politik yang menjadi pemenang ini tidak mampu menyelesaikan segala masalah yang dihadapi termasuk dalam menetapkan Undang-undang dasar yang baru. dalam lembaga legislatif ini banyak terdapat kubu-kubu yang menghendaki perubahan falsafah negara, ada yang menginginkan Islam sebagai falsafah negara sedangkan disatu pihak tetap menginginkan pancasila sebagai falsafah negara. Akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden kembali memakai Undang-undang dasar 1945 yang didukung sepenuhnya kekuatan ABRI.<sup>17</sup>

Ketika orde baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992 dan 1997. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu di bawah rezim orde baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal di negara-negara demokrasi pada umumnya. Semua itu terlihat dari banyaknya ketidakseimbangan antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan dan kekuasaan orde baru itu sendiri.

Rezim orde baru, setelah 32 tahun berkuasa, pada tanggal 28 mei 1998 berakhir dengan lengsernya jendral Soeharto tersebut akibat gerakan mahasiswa yang menuntut agar jendral Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tuntutan mahasiswa tersebut muncul karena kekecewaan rakyat terhadap kekuasaan orde baru yang sentralistik dan otoriter. Indonesia setelah sepeninggal Soeharto mengalami proses reformasi besar-besaran, dan liberalisasi atau

---

<sup>17</sup> *Ibid*



mengefektifkan kembali hak-hak yang melindungi individu dan kelompok – kelompok sosial yang tindak sewing-wenang yang di lakukan oleh negara, termasuk di dalamnya liberalisasi politik.<sup>18</sup>

Liberalisasi politik awal pasca orde baru ditandai dengan terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat. Ketika rezim Orde baru tumbang, setiap alangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikerangkeng. Dengan adanya tuntutan tersebut terjadi adalah luapan kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan membentuk organisasi.

Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai oleh terjadinya ledakan partisipasi politik. Partispasi politik dalam konteks dinamika perpolitikan sangat urgen dalam suatu masyarakat. Partispasi politik yang dilakukan setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala kebutuhan masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Yang paling ditekankan dalam hal ini adalah sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada, darinya individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik. Secara sederhana Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menjelaskan, bahwa partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat

---

<sup>18</sup> Lili Romli, *Op. Cit.* h. 105 .

pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum.

Ledakan ini terjadi dalam bentuk beragam. Pada tataran masa akar rumput, ledakan partisipasi politik banyak mengalami bentuk huru-hara, kekerasan masa, amuk massa atau praktik penjarahan kolektif. Di kalangan mahasiswa terjadi demonstrasi dan protes di mana-mana. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik baru.<sup>19</sup>

Setelah presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh wakil presiden Bachruddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa pemilu dilaksanakan pada 7 juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari public, termasuk dunia Internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini dilanjutkan dengan sidang pemilihan umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 106.

sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ketika rezim orde baru bergulir dan berganti dengan masa reformasi maka bermunculan kembali partai-partai politik yang berasaskan Islam hingga sampai pada saat ini. Adapun partai-partai Islam yang mengikuti pemilu tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Partai Indonesia Baru (PIB)
2. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)
3. Partai Umat Islam (PUI)
4. Partai kebangkitan Umat (PKU)
5. Partai Masyumi Baru
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
7. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
8. Partai Abu Yatama (PAY)
9. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905)
10. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan (PK)
13. Partai Nahdlatul Ulama (PNU)
14. Partai Islam Demokrat (PID)
15. Partai Persatuan (PP)
16. Partai Kebangkitan bangsa (PKB)
17. Partai Cinta Damai (PCD)
18. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)
19. Partai Ummat Muslim Indonesia (PUMI).<sup>20</sup>

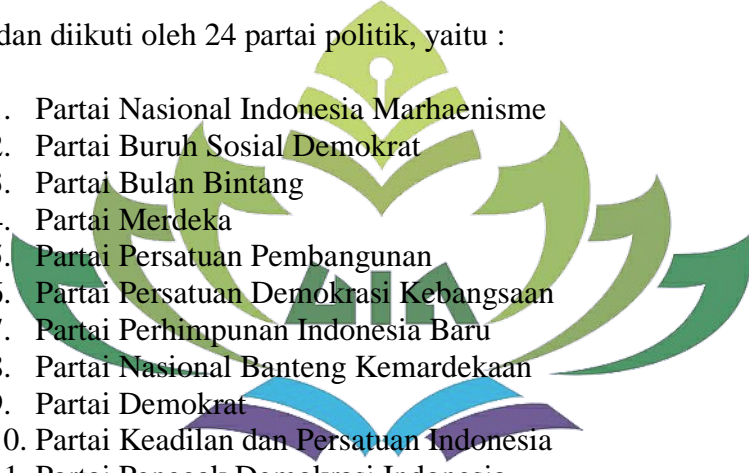
Pemilihan Umum tahun 1999 merupakan kesempatan emas bagi komunitas politik Islam Indonesia, setidaknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti masa lalu. Dalam khazanah politik mutakhir Indonesia, pemilu tahun 1999 merupakan sejarah pemilu yang jujur dan adil. Maka, siapapun tidak akan menolak bahwa saat ini merupakan momentum yang amat berharga bagi

---

<sup>20</sup> Arskal Salim, *Partai Islam dan relasi Agama-Negara* (Jakarta: JPRR Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999, h. 39.

setiap kekuatan politik, termasuk partai-partai politik Islam, untuk memulihkan harga diri politiknya. Reformasi telah membuat situasi politik secara keseluruhan reatif mencair. Hampir semua kekuatan atau kelompok politik berada pada posisi yang sebanding. Walaupun muncul banyak partai berazas dan bersimbol Islam, tidak satupun agenda politik mereka memiliki program untuk mendirikan Negara Islam. Semuanya mencita-citakan Indonesia yang demokratis, bebas dari sisa-sisa tradisi negatif orde baru.

Pada pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu :

- 
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
  2. Partai Buruh Sosial Demokrat
  3. Partai Bulan Bintang
  4. Partai Merdeka
  5. Partai Persatuan Pembangunan
  6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
  7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
  8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
  9. Partai Demokrat
  10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
  11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
  12. Partai Persatuan nahdlatul Ummah Indonesia
  13. Partai Amanat Nasional
  14. Partai Karya Peduli Bangsa
  15. Partai Kebangkitan Bangsa
  16. Partai Keadilan Sejahtera
  17. Partai Bintang Reformasi
  18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  19. Partai Damai Sejahtera
  20. Partai Golongsn Karya
  21. Partai Patriot Pancasila
  22. Partai Sarikat Indonesia
  23. Partai persatuan daerah
  24. Partai Pelopor

Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2009 Partai politik peserta pemilihan umum kembali mengalami peningkatan dalam jumlah, yaitu sebagai berikut :

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai karya peduli bangsa (PKPB)
3. Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5. Partai GERAKAN Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Barisan nasional (Barnas)
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
8. Partai keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Amanat nasional (PAN)
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15. Partai Nasional Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
16. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
17. Partai Karya Perkuangan (PKP)
18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
21. Partai Republik Nusantara (RepublikaN)
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan karya (Golkar)
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia )
27. Partai Bulan Bintang (PBB)
28. Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
29. Partai Bintang Reformasi (PBR)
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34. Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU)
35. Partai merdeka
36. Partai persatuan Nahdlatul Ulama (PPNUI)
37. Partai Sarikat Indonesia (PSI)
38. Partai Buruh

Ketika memasuki Pemilihan Umum pada tahun 2014 ini, tidak semua partai politik yang telah mengikuti pemilu 2009 diperbolehkan menjadi peserta pemilihan umum semua itu dikarenakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat telah membuat kebijakan baru bahwa partai politik yang bisa mengikuti pemilihan umum itu hanya partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014 yang dinyatakan lolos verifikasi adalah sebagai berikut :

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Damai Aceh (PDA)
12. Partai Nasional Aceh (PNA)
13. Partai Aceh (PA)
14. Partai Bulan Bintang (PBB)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Pada pembahasan kali ini, peneliti hanya akan memaparkan partai politik yang menggunakan Islam sebagai azas saja. Berikut ini adalah profil dari partai-partai tersebut :

### **1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah



(Perti) dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

### ➤ **Identitas PPP**

#### **Visi PPP**

Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

#### **Misi PPP**

- PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan umat beragama, mengembangkan ukhluwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya paham-paham Ateisme, Komunisme/Marxisme/Leninisme, serta Sekulerisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhluwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian

PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

- PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, memperahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhluwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpeecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
- PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untul mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menantang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat.
- PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, keesnjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan **BAB II ASAS, SIFAT, DAN PRINSIP PERJUANGAN**

**Pasal 2** PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal*

*Jama'ah*.<sup>21</sup>

## **2. Partai Bulan Bintang (PBB)**

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.

### **Latar belakang**

Partai Bulan Bintang telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.. Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden SBY, Yusril juga dikenal sebagai tokoh yang memelopori Amendemen Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> AD/ART Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016 diakses pada tanggal 12 desember 2017

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Bulan\\_Bintang](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bulan_Bintang) diakses pada tanggal 14 desember 2017

Sesuai dengan anggaan dasar **BAB II ASAS DAN TUJUAN** Pasal 3 Asas Partai ini berasaskan Islam. Maksud dari partai ini adalah PBulan Bintang.<sup>23</sup>

### 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

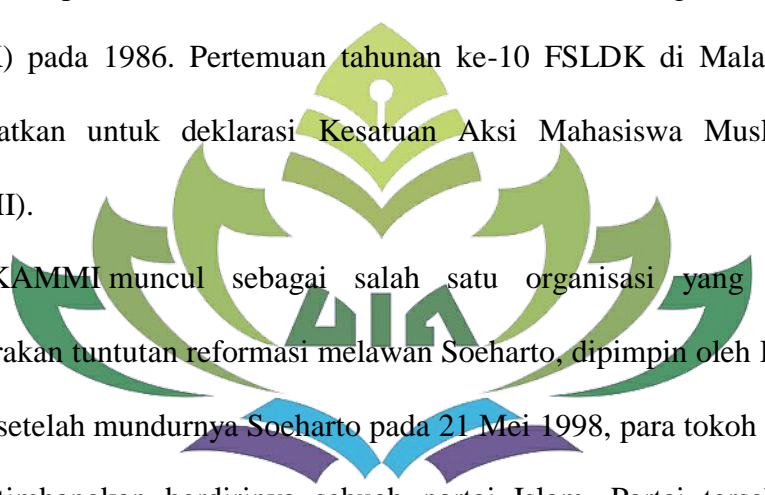
Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia.<sup>24</sup> Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kucing kurap. Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Luth, Thohir M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya dalam bahasa Indonesian*. (Jakarta: Gema Insan 1999), h. 68

Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam. Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader. Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986. Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).



KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal

memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan *stembus accord* dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.

Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.



Sesuai dengan BAB I Nama, Asas, Ciri, Kedudukan, dan Atribut Pasal 2 ayat 1 partai berasaskan Islam.<sup>25</sup>

Mahasiswa terutama aktivis adalah orang yang akan diharapkan sebagai penerus dari sebuah bangsa maka maju dan tidak sebuah bangsa tergantung generasi mudanya terutama mereka yang berstatus mahasiswa dan tergabung dalam organisasi mahasiswa. Dibawah ini akan peneliti paparkan pendapat mahasiswa terutama aktivis yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Islam.

### **Perspektif Kader KAMMI**

Partai politik Islam adalah representasi dari identitas Islam di Indonesia dalam Islam sendiri bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala kehidupan manusia baik itu sistem, dari sisi waktu maupun dari sisi zaman sehingga tidak ada sekat antara politik dengan Islam politik dalam Islam adalah salah satu unsur yang harus dilakukan oleh umat Islam karena berpolitik adalah bagian dari menyemai kemaslahatan bagi umat terutama umat Islam di Indonesia dan umat manusia pada umumnya sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Partai politik Islam di jadikan satu dalam konteks politik di Indonesia adalah sesuatu yang imposible karena setiap partai memiliki landasan filosofis, landasan ideologis dalam melaksanakan platform partai politik nya itu yang pertama. Lalu yang kedua ada faktor electoral yang perlu diperhatikan oleh umat Islam dengan adanya banyak partai Islam ini bisa memberikan opsi kepada umat untuk memberikan suara kepada partai Islam tersebut jika partai Islam itu 1 hanya

---

<sup>25</sup> AD dan ART PKS h. 3

1 ini akan sulit bersaing dengan partai-partai nasionalis yang sekuler lainnya yang lebih banyak lagi pula dalam sistem koalisi partai politik keberadaan banyak partai itu penting sehingga jika hanya ada 1 partai itu mempersulitkan partai Islam ditengah gempur-gempuran partai sekularis lainnya dengan adanya banyak partai Islam intinya akan mempermudah proses koalisi.

Permasalahan partai Islam yang pertama saat ini adalah menumbuhkan kepercayaan publik terhadap citra Islam yang mereka bahwa partai Islam belum memberikan image yang berbeda dengan partai sekularis lainnya kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya itu menjadi salah satu contohnya. Lalu yang ke dua partai Islam dinilai gagal melakukan proses pengkaderan karena banyak sekali partai Islam yang hilang pengaruh ketika tokoh-tokoh tersebut tidak lagi didalam partai tersebut bisa kita lihat beberapa partai politik yang mulai redup pengaruhnya terhadap masyarakat setelah proses pengkaderisasi nya hilang proses regerasinya lemah itu.

Partai Islam memiliki tujuan jelas sebagai partai untuk menyemai kemaslahatan, untuk membela kepentingan umat dan bangsa ini baik sebagai salah satu contoh fastabiqul khoirot. Dalam konteks Indonesia yang telah menjadikan pancasila sebagai dasar negara maka sifat politik Islam adalah sifat moderat yaitu pertengahan, menengah ini adalah sifat Islam itu sendiri yaitu tawassuth yaitu sebagai umat pertengahan yaitu dia tidak keras dan tidak juga terlalu cair melainkan seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apakah partai Islam perlu mendirikan negara Islam tidak perlu karena bangsa telah menyepakati bahwa kita lahir, besar, dan mati adalah sebagaian dari NKRI karena NKRI adalah

harga mati. Terus adapun Islam disini adalah Islam yang substansi meskipun sistemnya adalah demokrasi dan undang-undangnya adalah undang-undang dasar 45 yang berlandaskan pancasila tapi tetap sebagai hukum positif tetap menggunakan azaz Islam sebagai bagian dari aspirasi umat Islam itu jadi nggak perlu adanya negara Islam yang penting Islam substansi masuk kedalam sector-sektor politik misalanya di bidang ekonomi , dibidang tata negara, di pendidikan tanpa harus menyebut negara khilafah atau daulah Islamiyah atau negara Islam begitu.

Sebetulnya tidak ada yang namanya partai Islam atau partai nasionalis karena partai Islam adalah partai nasionalis juga karena mereka tidak ada gerakan makar begitu juga dengan partai nasioanalis mereka juga di huni orang-orang Islam jadi sebetulnya yang harus dibedakan itu adalah partai nasioanalis relegius dengan partai nasioanalis sekularis itu harusnya. Lalu apakah saya akan memilih partai Islam jelas partai adalah idetitas bagi umat Islam Indonesia dengan memilih partai Islam itu adalah bentuk keberpihakan kita kkepada Islam alasannya itu.<sup>26</sup>

### **Perspektif Kader IMM**

Kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam (Qur'an dan Hadits ) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara.

---

<sup>26</sup> Wawancara Ahmad Pengurus PD KAMMI LAMPUNG 28/12/1017

Seharusnya sih satu aja karen dengan adanya satu partai tersebut oromatis akan dapat memenabgkan pemilu apalagi Islam kan di Indonesia merupakan mayoritas kita ambila ja contoh kasus dimana adalah satu pejabat di pulau sebrang sana yang menjelekan Islam disitulah Islam bersatu.

Permasalahan yang dihadapi partai Islam saat ini adalah bagaimana membangun citra Islam dalam kehidupan nyata. Tidaka adanya cirri khas yang mebedakan Islam dengan partai lainnya.

Partai Islam, karena melalui dengan memilih partai Islam tersebut dapat membuat negara kita menjadi lebih baik apalagi Indonesia kan umat Islam nya terbanya di asia tenggara.<sup>27</sup>

#### **Perspektif Kader PMII**

Partai politik Islam adalah partai yang menjadikan Islam senagai panutan, tujuan hidup serta tetap berpegang teguh ahlussunah wa jama'ah.

Tidak, Karena sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi dan juga Indonesia menganut multi partai.

Permasalahan yang dihadapi partai Islam adalah kurangnya perceyaan masyarat terhadap partai dikarenakan bekum adanya pembeda dengan partai lainnya.

Tujuan partai itu bagus sih. Cuma dalam pem praktekan nya saja yang gak sesuai dengan teorinya.

Partai Islam dong. Kan saya umat Islam.<sup>28</sup>

---

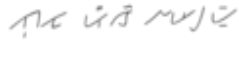
<sup>27</sup> Wawancara dengan zaid ketua umum IMM Rayon Ushuluddin 25/01/2018

<sup>28</sup> Wawancara dengan Intan Kurnia Sari ketua umum PMII Rayon Ushuluddin 20/01/2018

## BAB III

### HMI CABANG BANDAR LAMPUNG

#### A. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung (Aksara Lampung: ) adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung.

Secara geografi, kota ini adalah pintu utama pulau Sumatera, tepatnya sekitar 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki peran penting dalam jalur transportasi darat serta aktivitas pendistribusian logistik. Bandar Lampung memiliki wilayah daratan seluas 169,21 km<sup>2</sup> yang dibagi dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan mempunyai populasi penduduk sebanyak 1.166.761 jiwa, itu berdasarkan data tahun 2015 kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km<sup>2</sup> dan digambarkan mempunyai jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Pada masa kini kota Bandar Lampung menjadi pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung.

##### 1. Zaman Prakemerdekaan Indonesia

Wilayah Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah *Onder Afdeling* Telukbetung yang dibentuk berdasarkan *Staatsbalat* 1912 Nomor : 462 yang terdiri dari Ibukota Telukbetung sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telukbetung ini meliputi juga kota Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telukbetung

Ibukota *Onder Afdeling* Telukbetung adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telukbetung sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung.

Kedua kota itu tidak termasuk ke dalam Marga *Verband*, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala *Onder Afdeling* Telukbetung.

Pada zaman pendudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telukbetung dijadikan *shi* (Kota) di bawah pimpinan seorang shichō (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang fukushichō (bangsa Indonesia).

## 2. Zaman setelah Kemerdekaan Indonesia

Pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 1940-an, atau saat ini disebut dengan Jalan Kartini. Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Teluk Betung menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya UU No. 22 Th 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung.

Secara geografis, Teluk Betung berada di selatan kota Tanjung Karang, karena di marka jalan, Teluk Betung yang dijadikan patokan batas jarak ibukota provinsi. Telukbetung, Tanjungkarang, Panjang, dan Kedaton merupakan wilayah tahun 1984 yang digabung kedalam satu kesatuan yang saat ini disebut sebagai Kota Bandar Lampung, dikarenakan ketiganya tidak ada batas pemisahan yang jelas.

Pada perkembangannya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah serta mengalami beberapa kali perluasan wilayah hingga sampai tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung statusnya dinaikkan menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965. Kota Tanjungkarang



dan Telukbetung diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II kota Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota dari Provinsi Lampung.

Berdasarkan PP No. 24 Th 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254. Kemudian ditindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditambah dengan Keputusan Wali kota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipakai hingga saat ini<sup>1</sup>.

### 3. Hari lahirnya Kota Bandar Lampung

Hari lahirnya kota Bandar Lampung ditetapkan sesuai dengan sumber sejarah yang berhasil ditemukan, -terdapat catatan bahwa berdasarkan penyampaian dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningratatau yang disebut dengan Duta Kesultanan yang disampaikan pada tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: “Lampung Telukbetung di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”(Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777

---

<sup>1 1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandar\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung) di akses tanggal 23 januari 2018 pukul 08,30 wib.

dst.), Berdasarkan Staabat Nomor : 10/1873 (Beslit Gouvenur General) tanggal 8 April 1873 nomor 15 tentang Pembagian Keresidenan Lampung menjadi 6 Afdiling TelukBetung dengan Ibukota TelukBetung.<sup>2</sup>

## B. HMI CABANG BANDAR LAMPUNG

HMI didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 yang diprakarsai oleh Lafran Pane.<sup>3</sup> Merupakan organisasi mahasiswa berazaskan Islam pertama dalam sejarah Indonesia. Sejarah HMI menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia dan Umat Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan sikap HMI yang melihat Indonesia dan Islam sebagai satu kesatuan yang tidak perlu dipertentangkan.<sup>4</sup> Bila membicarakan sejarah HMI maka tidak bisa lepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, Sejarah HMI merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari mempertahankan kemerdekaan, penumpasan PKI pada Orde lama dan dilanjutkan sejarah Indonesia serta masa orde baru.<sup>5</sup>

Menurut Agussalim Sitompul dalam buku *Sejarah dan perjuangan HMI (1947-1975)* menjelaskan bahwa latar belakang berdirinya HMI ada tiga faktor, yaitu: *Pertama*, situasi Negara Indonesia. *Kedua*, kondisi umat Islam Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sumber Buku Selayang Pandang Kota Bandar Lampung) dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

<sup>3</sup> Lafran Pane lahir di kampung pagurabaan, kecamatan Sipirok, Kabupaten Padang sidenpuan, Sumatera Utara pada tanggal 12 April 1923. Lafran Pane terkenal sebagai seorang pemuda yang ulet dan muslim yang taat serta seorang penganut teguh ajaran-ajaran Muhammadiyah. Lihat Victor Tanja, *Himpunan Mahasiswa Islam : Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 53.

<sup>4</sup> Budhya Munawar-Rachman, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid : Pemikiran Islam di Kanvas peradaban* (Jakarta: Mizan, 2006), h. 1193-1195.

<sup>5</sup> Agussalim Sitompul, *Historiografi HMI 1947-1993* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1995), h. 77.

*Ketiga*, situasi didunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Budi Rikoyo, di samping tiga faktor di atas, terdapat satu faktor lain yang menjadi latarbelakang berdirinya HMI, yaitu situasi dunia Internasional.<sup>7</sup>

Hingga masa kini HMI masih tetap hadir dan memberikan peranannya pada bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat dikongres HMI ke 29 pada tahun 2015 di pekanbaru menyatakan bahwa jumlah cabang HMI setingkat kabupaten kota yang ada di Indonesia lebih dari 200 cabang baik Sabang hingga sampai Marauke. Dengan jumlah anggota aktif sebanyak lebih dari 500.000 mahasiswa se-Indonesia.

Berawal dari beberapa latar belakang di atas muncul sebuah keinginan untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang mampu mengkoordinir dan memperhatikan keperluan mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Akhirnya tahun 1947 berdirilah HMI sebagai sebuah organisasi mahasiswa (Ormawa) Islam yang pertama yang ada di Indonesia.<sup>8</sup>

Ide atau gagasan pembuatan organisasi mahasiswa Islam HMI sudah ada sejak November 1946 yang diprakarsai Lafran Pane, mahasiswa semester satu Sekolah Tinggi Islam (STI), yang sekarang disebut dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Namun baru pada tahun berikutnya gagasan tersebut dapat terealisasi.

Dikala gagasan tersebut muncul Lafran Pane menghadirkan para mahasiswa Islam yang berada di kota Yogyakarta baik Sekolah Tinggi Islam (STI), Balai perguruan Tinggi Gajah Mada (sekarang UGM) dan sekolah Tinggi

---

<sup>6</sup> Agussalim Sitompul, *Sejarah dan perjuangan HMI 1947-1975* (Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008), h. 5-10.

<sup>7</sup> Victor Tanja, *Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan kedudukannya di tengah Gerakan –gerakan Muslim Pembahru di Indonesia* (Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1991), h. 53.

<sup>8</sup> Agussalim Sitompul, *Op.Cit.* 12.

teknik (STT), untuk rapat, guna membicarakan maksud gagasan tersebut. Rapat ini dihadiri oleh 30 orang mahasiswa diantaranya adalah anggota perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Namun rapat tersebut tidak menemukan jalan kesepakatan, karena adanya penolakan dari anggota PMY dan GPII yang takut tersaingi dan akan kehilangan pengaruhnya terhadap mahasiswa.<sup>9</sup>

Walaupun beberapa kali mengalami kegagalan, namun hal ini tidak menjadikan semangat Lafran Pane muda luntur. Ia justru semakin semangat dan ingin segera mendirikan HMI. Berbagai cara dilakukan, mulai dari berdiskusi dengan Prof. Abdul Kahar Muzakar selaku rektor STI, menyiapkan anggaran dasar dan visi misi organisasi sampai mencari mahasiswa di luar STI untuk menyamakan visi.

Seiring semakin matangnya situasi dan persiapan pembentukan HMI dan dukungan terhadap cita-cita Lafran Pane semakin bertambah, hal ini seperti yang diceritakan Setelah mengalami berbagai hambatan yang cukup susah selama lebih kurang tiga bulan, detik-detik kelahiran organisasi mahasiswa Islam (Ormawa) akhirnya datang juga. Saat itu adalah hari-hari biasa mahasiswa STI datang sebagaimana biasanya untuk mengikuti kuliah-kuliah, tanpa diduga dan memang sudah takdir Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang biasanya menentang keras kelahiran HMI tidak mengikuti perkuliahan.<sup>10</sup>

Sehingga pada tanggal 5 Februari 1947 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H. di salah satu kelas tempat perkuliahan Sekolah Tinggi Islam

---

<sup>9</sup> Deliar Noer, *"HMI Tidaka Akan Lupa Panggilan Zaman Serta kehendak Masa"* disampaikan pada pidato Dies Natalis HMI ke-7 pada 5 Februari 1954, Dalam Hariqo Wibowo Satria, *Lafran Pane :Jejak Hayat dan Pemikirannya* (Jakarta: Penerbit Lingkar, 2011), h. 55-56.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 57.

di jalan Setyodiningrat 30 (sekarang jalan senopati) Yogyakarta, lafran Pane dan kawan-kawan meminta izin kepada Yahya Husein selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir untuk menggunakan jam kuliah tersebut agar dapat mengadakan rapat pembentukan HMI.<sup>11</sup>

Setelah mendapatkan izin dari Yahya Husein, datanglah lafran Pane yang langsung berad di depan kelas sembari berdiri dan memimpin rapat dalam pemaparannya mengatakan, bahwa hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa (Ormawa) Islam, karena semua syarat yang diperlukan sudah beres. Siapa yang mau menerima berdirinya organisasi mahasiswa Islam ini, itu saja yang diajak, dan yang tidak setuju biarlah mereka tetap menentang.<sup>12</sup>

Adapun peserta yang hadir dalam rapat tersebut adalah Lafran Pane, karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Maisaroh Hilal, Suwali, Yusdi Ghozali, Mansyur, Siti Zainah, Muhammad Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toah Mashubi dan Bidron Hadi.<sup>13</sup>

Rapat pada hari itu dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta rapat dinyatakan sepakat dan ketetapan hati untuk mengambil keputusan. Adapun keputusan yang diambil saat itu adalah :

- a. Hari Rabu 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan tanggal 5 Februari 1947, menetapkan berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam disingkat HMI yang bertujuan :

---

<sup>11</sup> Victor Tanja, *op. cit.*, h. 53.

<sup>12</sup> Hariqo Wibawa, *op. cit.*, h. 58.

<sup>13</sup> Dalam ketetapan kongres ke XI HMI di Bogor No. XIII/XI/1974 tanggal 29 mei 1974 menetapkan Prof. Drs. Lafran Pane sebagai pemrakarsa lahir dan berdirinya HMI dan disebut sebagai pendiri organisasi HMI. Dalam salah satu teori berdasarkan penelitian sejarah, pendiri HMI selain lafran Pane adalah terbatas pada mahasiswa-mahasiswa yang hadir dalam dalam rapat yang menyetujui berdirinya HMI sebagaimana telah disebutkan.

- 1) Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat penduduk Indonesia.
  - 2) Menegakkan serta menyebarkan ajaran islam
- b. Menegaskan anggaran dasar (AD) Himpunan Mahasiswa Islam. Serta anggaran Rumah Tangga (ART) akan dibuat kemudian.
  - c. Sekertariat HMI dipusatkan di Asrama Mahasiswa, jalan Setyodiningrat 30 (jalan P. Senopati 5, sekolah asisten Apoteker SAA-Sekarang).

Setelah selesainya kongres HMI ke-6 (enam) di Makassar dengan terpilihnya Nursal sebagai ketua umum atau pimpinan PB HMI, pada tahun 1960 saat itulah HMI Cabang Bandar Lampung mendapat persetujuan dari PB HMI yang terbentuk pada tahun 1961 yang sebelumnya bernama HMI Cabang Tanjung Karang. HMI Cabang Tanjung Karang terbentuk dikarenakan oleh kondisi dinamika Nasional yang terjadi pada saat itu oleh kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia) yang tumbuh dengan pesat di beberapa daerah di Indonesia termasuk provinsi Lampung yang mengancam kedaulatan NKRI. HMI Cabang Tanjung Karang pula merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Besar HMI yang ada di Jakarta yang memiliki misi mempertahankan NKRI dari kelompok-kelompok komunis tersebut.

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang bertugas mempertahankan NKRI Pra-kemerdekaan sedikit kewalahan untuk menumpas gerakan Komunis yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dan lagi sudah merambah kalangan mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi yang ada. ABRI bekerja Sama dengan organisasi-organisasi Islam yang ada salah satunya yaitu

HMI dan ABRI melihat bahwa Himpunan Mahasiswa Islam yang bergerak di dunia kemahasiswaan memiliki *goal* yang sama yaitu mempertahankan NKRI.<sup>14</sup>

Tahun 1960 didirikan sebuah perguruan tinggi baru di Lampung yang terbentuk dari Universitas Sriwijaya (Unsri) di Sumatera Selatan yang memiliki 2 fakultas pertama, yaitu Fakultas Ekonomi dan Hukum (FEHS) Lampung. Terbentuknya Universitas Lampung Negeri di Lampung tersebut, melatarbelakangi Pengurus Besar (PB) HMI yang ingin menegembangkan proses pengkaderan hingga pelosok negeri Indonesia termasuk di Lampung yang bertempat di Ibu Kota Provinsi yaitu Tanjung Karang. Pengurus besar akhirnya memberikan mandat kepada dua orang mahasiswa yang bernama Basirun Usman dari fakultas hukum dan M. Zaini dari fakultas Ekonomi, dengan dibentuknya HMI provinsi Lampung. Pada tahun yang sama, ABRI yang sedang gencar menumpas gerakan komunis di Indonesia termasuk di Lampung, bekerja sama dengan para tokoh cendekiawan muslim yang sedang bersekolah termasuk kepada 5 (lima) orang tokoh HMI di Lampung untuk membantu menumpas gerakan komunis tersebut.<sup>15</sup>

### C. Struktur HMI Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan surat keputusan PB HMI Nomor 135/Kpts/A/09/1437 maka struktur pengurus HMI Cabang Bandar Lampung sebagai berikut :

#### **KETUA UMUM**

Ketua Bidang Pembinaan Anggota

Ketua Bidang Pembina Aparatur Organisasi

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda

Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi

**:Yefri Febriansyah**

: Sandi Saputra

: Nurul Yuliana

: Putra Ramadan

: Mufti Ali W

<sup>14</sup> <http://kahmilampung.or.id/2017/04/27/berdirinya-hmi-bandar-lampung/> diakses pada tanggal 21-12-1017.

<sup>15</sup> Editor Ivan Kurnia, *Sejarah Perjalanan HMI Cabang Bandar Lampung* (Bandar Lampung: HMI Cabang Bandar Lampung Press, 2016), h.7-8.



Ketua Bidang Partispasi dan Pembangunan Daerah	: Husni Mubarak
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat	: Okta Purnama
Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup	: Rio Andesta
Ketua Bidang Pemberdayaan Prempuan	: Rominta Yani Siregar

### **SEKRETARIS UMUM**

Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembinaan Anggota	: Marion : Feri Saputra
Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembina Aparatur Organisasi	: Ade Sanjaya : Irpan Zamzami
Wakil sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda	: Fajriansyah : Nurul Iman Subing

Wakil sekretaris umum bidang kewirausahaan dan Pengembangan Profesi :	: M. Fiqri Alaxander : Andhika Pratama
--	---

Wakil Sekretaris Umum Bidang Partispasi dan Pembangunan Daerah	: Zerdinal Pratama : Edwin Juwantara
---	---

Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Umat	: Rohim Mubin : Ritno Ananto
--	---------------------------------

Wakil Sekretaris Umum Bidang Ham Dan Lingkungan Hidup	: Kodri Ubaidillah : Kurnia Wijaya
---	---------------------------------------

Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Prempuan	: Purnama ulia S.
--	-------------------

### **BENDAHARA UMUM**

Wakil Bendahara Umum	: <b>MURSYID AGNIA S</b> : Silvia Limarini
----------------------	---

### **DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

Departemen Pengkajian Data dan Informasi	: Iin Tajudin
Departemen Diklat Anggota	: Ramat Edward
Departemen Pengembangan dan Promosi Kader	: Adran Soedrajad
Departemen Pembinaan Aparatur Organisasi	: Apriansyah
Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan	: Febri Ramadona
Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent	: Kemas M. Fahmi
Departemen Kepemudaan	: Abung Paratama
Departemen Kewirausahaan	: Noval Ardiansyah
Departemen Pengembangan Profesi	: Trimio Parabowo
Departemen Pengkajian Masalah Keumatan	: Imam Muklasin
Departemen Hubungan Lembaga Islam	: Anggi Hanadi
Departemen HAM	: Sanhan
Departemen Lingkungan Hidup	: Abu Rizal
Departemen Kajian Prempuan	: Zia Ulhaki

Departemen Hubungan Lembaga Perempuan  
 Departemen Penerangan dan Humas  
 Departemen Administrasi dan Kesekretariatan

: Agus Defriyanto  
 : Hardiansyah  
 : M. Rasikin

#### **D. Pengkaderan di HMI Cabang Bandar Lampung**

Organisasi yang kokoh, doktrin perjuangan yang kuat, didukung oleh SDM yang berkualitas. Sinergi dari tiga pilar organisasi ini yang membuat HMI Berjaya menghadapi PKI serta berkembang menjadi organisasi yang terbesar. Tidak rubah nya dengan organisasi pada umumnya yang membutuhkan manusia sebagai tenaga penggerak atau regenerasi agar organisasi tersebut tetap hidup dan berjalan maka membutuhkan yang namanya kader atau anggota. Perkaderan HMI yang menjadi kegiatan paling utama atau prioritas yang diselenggarakan secara nasional, berjenjang, dan berlanjut sesuai sistem perkaderan yang ditetapkan. Memang telah disadari sepenuhnya bahwa kader adalah kekuatan vital yang menjadi kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Tanpa kader yang berkompeten dan berkualitas. Maka, organisasi akan lemah kemudian mati karena seyogyanya hidup, mati dan buruk serta baiknya organisasi tergantung dari kadernya. Langkah HMI pada pengkaderan sangat tepat dan diletakkan pada prioritas yang sangat tinggi atau paling utama. Semua struktural pengurus dari pusat sampai daerah harus melaksanakan tugas perkaderan sesuai wewenang masing-masing.

Pada tahun 1960-an, kalau kita melintasi jalan di Puncak, Bogor jika melihat ke kanan dan ke kiri, pasti terlihat spanduk-spanduk yang terpampang dengan tulisan jelas “sedang ada *training* HMI”. Training HMI dalam berbagai macam tingkatannya memang dilaksanakan di vila-vila dan hotel kawasan Puncak yang nyaman.

Kader HMI berlatih sambil berlibur atau bertamasya di tempat wisata yang indah. Kegiatan seperti ini juga bisa kita lihat di wisata Kaliurang-*training* HMI Yogyakarta tidak pernah berhenti dilaksanakan di tempat itu. Di kota-kota-kota di Medan, Makasar, Malang, Surabaya, Semarang, dan lainnya, perkaderan tidak kalah giat diselenggarakan. Pelatihan yang marak dimana-mana itu menjadi hal yang menarik, sehingga mahasiswa mengalir menjadi anggota HMI.

Selain karena penyelenggaraannya bagus, materi yang diajarkan menarik, juga karena instrukturnya adalah tokoh mahasiswa terkemuka seperti Sulastomo, Mari'e Muhammad, Fahmi Idris, Aniswati, Firdaus Wadjidi, Nazar E. Nasution, Harun Kamil, Nurcholis Madjid untuk Jakarta, A. Malik Fadjardi Malang, Sujoko Prasodjo, Sularso, Jusuf Syakir di Yogyakarta. Forum pelatihan kader tidak saja menjadi tempat untuk meningkatkan kualitas, namun juga menjadi media untuk meluaskan pergaulan yang kelaksanan berguna dalam bekerja. HMI menjadi jaringan kerja yang luas, akrab, serta bermanfaat. Sistem perkaderan HMI dapat diketahui arah, jenjang dan kurikulumnya, serta berkembang dinamis sesuai perkembangan jaman. Tetapi apapun tindakan perubahan dan pembaharuan yang dilakukan, tetap diarahkan pada pencapaian tujuan HMI sesuai dengan pasal 4 HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Setelah *training*, diharapkan mereka dapat mengimplementasikan pengetahuannya sebagai aktivis HMI baik di lingkungan *intern* maupun *ekstern* universitas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Alfian Alfian, *HMI (Himpunan mahasiswa Islam)*, (Jakarta: PT Kompas media nusantara, 2013), h. 141-142.

## BAB IV

### PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF KADER HMI CABANG BANDAR LAMPUNG

#### A. Beragam Perspektif Kader Terhadap Partai Politik Islam

Salah satu isu menarik dalam perkembangan Islam di Indonesia di masa modern adalah kembali berkiprahnya Partai-Partai Politik Islam dalam pemilihan umum. Edi suryanto mengatakan Partai Politik Islam adalah partai yang notabene nya berlandaskan Islam serta goal sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.<sup>1</sup> Iin Tajudin mengatakan Partai Politik Islam adalah sebuah partai politik yang menggunakan nilai agama Islam dalam menjalankan organisasi parpol dan menggunakan Islam sebagai arah perjuangannya.<sup>2</sup>

Perspektif adalah inti komunikasi. John R. Wenburg menjelaskan bahwa perspektif merupakan cara organisme member makna.<sup>3</sup> Rudolf F Verbeder, mengatakan bahwasanya persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Perspektif disebut dengan inti komunikasi, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pendapat kader HMI Cabang Bandar Lampung.

Khoirul Anam mengatakan Partai Politik Islam adalah sebuah lembaga organisasi Islam yang ikut dalam kontes mencari kader, mencari massa, mendidik, dan memberikan pelatihan kepada kader dan partisipan dengan pola dan jargon Islam sebagai azas yang di tawarkan untuk mencapai sebuah kekuasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan edi Suryanto selaku sekretaris umum HMI komisariat Ushuluddin pada tanggal 19-08-2017 pukul 10.23 wib.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Iin Tajudin selaku pengurus HMI Cabang Bandar Lampung pada tanggal 12 september 2017 pukul 13.00 wib.

<sup>3</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 168.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Khoirul Anam selaku sekretaris umum HMI Cabang Bandar Lampung pada tanggal 09 september 2017 pukul 07.28 wib.

Mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dimasa yang akan datang. Keberadaan partai politik Islam di Indonesia dirasa sangatlah penting ditengah-tengah masyarakat warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebagai wadah partisipasi politik praktis warga negara, partai politik Islam diharapkan mampu menjembatani dan menjalankan nilai-nilai keIslaman dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Himpunan mahasiswa Islam adalah Organisasi yang bersifat Independen. kader HMI tidak boleh berpihak kepada partai manapun baik partai yang berbasis Islam maupun partai berbasis Nasionalis, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh anggarda, HMI adalah organisasi yang bersifat independen sehingga HMI tidak boleh berafiliasi dengan partai politik.<sup>5</sup>

Ketika kader HMI terlibat dengan partai politik baik itu partai berbasis nasional maupun berbasis Islam maka dia dinyatakan gugur keanggotaan nya ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga HMI Bagian ke tiga di masa keanggotaan pasal 5 e masa keanggotaan berakhir apabila : ayat “menjadi anggota Partai Politik”.<sup>6</sup> ketika seorang mahasiswa apabila dia telah bergabung dengan partai politik maka dia akan mempunyai kecenderungan dan tidak akan independen disebabkan dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh partai tanpa memandang apakah itu benar apa salah menurut khalayak ramai.

Banyaknya partai Islam yang bermunculan setelah orde baru tumbang, menyebabkan Partai Politik Islam terpecah belah. Hal ini membuktikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan anggarda dwi putra selaku sekretaris umum BPL HMI Cabang Bandar Lampung tanggal 6 september 2017 pukul 08.45 wib.

<sup>6</sup>, *Hasil-Hasil Kongres ke HMI XXIX pekan baru, 22 November-5 Desember 2015*, (Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2016-2018), h. 76.

partisipasi masyarakat Indonesia sebagai warga negara sangat meningkat sejak zaman reformasi. Sejak saat itulah banyak partai politik yang bermunculan dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Hingga pada saat ini partai politik Islam telah berkembang dengan pesat dibandingkan pada zaman era reformasi. Akibat banyaknya partai tersebut menyebabkan permasalahan-permasalahan yang dialami partai seperti korupsi, gratifikasi, dan kurang ada metode yang cocok dalam pengkaderan serta saling menjatuhkan antara partai yang satu dengan yang lain guna meraih suara dan jabatan. Seperti yang dikemukakan oleh Krismanik :

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang selalu dikaitkan dengan dengan umat Islam sekarang terutama soal korupsi. nah itu seharusnya menjadi konsentrasi bagi partai Islam untuk mengubah bagaimana pandangan masyarakat terhadap partai Islam. Mulai dari perekrutan anggota sampai kepada penentuan pengurus di partai harus benar-benar selektif, cari orang yang benar-benar bersih.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh partai Islam seperti yang disampaikan oleh Riski Amanda:

Terlalu banyak perpecahan, selain itu partai politik Islam saat ini banyak perselisihan dan dituduh negatif oleh beberapa pihak karena tidak dapat bekerja sama dengan baik.

Kurangnya kerja sama antar partai dan sering terjadi perebutan kekuasaan serta tidak ada hal yang membedakan antara partai Islam dengan partai yang berbasis nasionalis menyebabkan masyarakat bingung membedakan mana yang partai nasionalis dan mana partai Islam.

## **B. Dampak Perspektif Kader HMI Terhadap Pilihan Politik**

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif ) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran usia. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikannya. Dalam penelitian ini penulis dan peneliti akan memaparkan dampak perspektif kader HMI terhadap partai politik Islam dalam pemilihan Umum.

Proses perubahan keberadaan politik Islam di Indonesia pasca orde, baru mengalami perkembangan yang begitu cepat dan dramatis. Pergeseran yang luar biasa juga terjadi pada pola kekuasaan yang akumulatif dalam mengambil Ambisi politik. Kondisi ini memberikan kecenderungan terhadap upaya pematangan didalam membangun dirkursor politik Islam nasional terhadap menguatnya bangunan demokrasi Indonesia.

Sejak merebaknya kasus korupsi akhir-akhir ini yang menjerat banyak nama pejabat pemerintah dan tersangkutnya salah satu partai besar, membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik kian menurun. Sebuah survei yang dilakukan oleh Centre of Strategic and International Studies (CSIS) 16-24 Januari 2012 lalu, menemukan fakta bahwa mayoritas rakyat tidak lagi percaya kepada partai politik, hasilnya yaitu sekitar 87,4 persen. Angka ini mirip dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh LSI akhir tahun lalu. Survei tersebut menyatakan



bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai politik anjlok, hanya tinggal 23,4 saja.<sup>7</sup>

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat mulai kurang percaya terhadap partai politik secara umum. Begitu juga kepercayaan kepada partai Islam secara khusus. Seperti diberitakan dalam CNN Indonesia, Partai politik yang mengusung ideology islam di Indonesia dinilai tidak mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam berpolitik. Hal ini membuat parpol Islam sulit jadi pemenang pemilu. Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubeidillah Badrun berpendapat, partai politik berbasis Islam tidak pernah melakukan riset mengenai kebutuhan ummat Islam di Indonesia.<sup>8</sup>

Hal ini karena perilaku oknum partai yang terjerat kasus dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat banyak. Kondisi ini berpengaruh terhadap kurangnya jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik Islam bahkan ada beberapa partai politik Islam yang tidak memenuhi batas ambang suara (*parliamentary threshold*). Seperti PBB (Partai Bulan Bintang). Sehingga partai tersebut tidak dapat ikut serta dalam koalisi mengusung calon presiden dan wakil presiden. Namun, tetap bisa ikut pada Pemilu di periode selanjutnya apabila lolos verifikasi factual.

Seharusnya dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam partai politik Islam menang apalagi ditambah dengan beberapa dukungan ulama dan tokoh agama yang terlibat langsung dalam politik praktis. Ini sejalan dengan

---

<sup>7</sup> <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/12/04/03/m1svbm-mengembalikan-peran-partai-politik> di akses pada tanggal 25 januari 2017.

<sup>8</sup> <https://CNNIndonesia.com/tak-bisa-terjemahkan-nilai-agama-parpol-islam-sulit-menang/kamis,25/1/2018>

pendapat, Kiayi Cholil pengasuh pondok pesantren Husnayain, yang mengatakan di DKI 82% penduduk muslim, namun pada pilada DKI dimenangkan oleh cagub muslim dengan cawagub seorang non-muslin. Beghitu juga di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dimenangkan oleh Calon dari ummat Kristen. Padahal, mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>9</sup>

Terkait permasalahan banyaknya partai dan kurangnya kerjasama antar partai menyebabkan beberapa kader HMI mempunyai pendapat, yaitu seharusnya partai Islam itu hanya 1 (satu) saja agar dapat memenangi Pemilu seperti yang diungkapkan oleh Wahyunita:

*“Partai politik Islam dijadikan satu nggak papa jadi justru itu bagus nantikan akan bersatu misalnya partai politik Islam terpecah kayak kondisi sekarag jadi banyak menyuarakan secara tegaslah kesalahan-kesalahan.”*

Pendapat serupa juga disampaikan oleh risky Amanda:

*“Setuju. Agar satu kesatuan dalam politik Islam itu membuat masyarakat Islam dalam bekerja sama contohnya seperti kejadian kemarin 212 bisa dapat bersaing dengan mudah. Memang jauh dengan lain. Karena penduduk Indonesia 95% adalah Islam. Berarti dengan mudahnya Islam mendapatkan suara yang besar.”*

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwasanya mereka setuju jika partai Islam dijadikan satu agar umat Islam tidak bingung dalam menentukan pilihan. Seperti ketika dimasa Orde Lama. dimana ketika waktu itu partai Islam itu hanya diwakili oleh Masyumi dan organisasi mahasiswa Islam itu hanya HMI.

---

<sup>9</sup> Voa-islam.com/umat islam harus menang dan berkuasa/18 juni 2013/

Menurut pengamat politik, Segitiga Institute mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengembalikan kejayaan partai Islam. Koalisi Islam dan massa Islam merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>10</sup>

Selain pendapat-pendapat tersebut ada juga kader yang tidak setuju jika partai politik Islam dijadikan satu dengan alasan bahwa negara kita menganut sistem multi partai, agar masyarakat dapat memilih mana partai Islam yang memang benar-benar sebagai perpanjangan tangan umat Islam atau hanya mementingkan kepentingan sektoral guna mendapatkan kekuasaan atau jabatan.

Seperti yang dikemukakan oleh Krismanik:

*“Tidak setuju, karena sistem dinegara kita menggunakan sistem multi partai, dan ideologi suatu partai Islam antara satu dengan yang lain itu berbeda, banyak partai Islam justru menginovasi bagi umat Islam untuk menentukan pilihan, akan tetapi tentu masih dalam satu tujuan, yaitu kemaslahatan umat Islam.”*

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Iqbal Syahbanu:

*“Tidak sepakat. Sederhananya karena dengan hadirnya beberapa parpol Islam itu salah satu pemilter pemimpin-pemimpin terbaik dari yang terbaik di negara Indonesia yang sangat besar jumlah kwantitasnya.”*

Beragamnya perspektif tersebut diakibatkan latar belakang jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh kader, serta jenjang pengkaderan yang telah dijalankan oleh kader tersebut dikarenakan dalam setiap pelatihan yang dilaksanakan di dalam HMI. Dimana mempunyai yang tujuan berbeda.

Dalam hal memilih Partai politik Islam tidak semua kader memilih hanya berdasarkan kedekatan ideologi yang menjadi acuan. Akan tetapi ada sebagian kader HMI yang lebih kritis dengan melihat program-program kerja yang di bawah oleh partai Islam tersebut.

---

<sup>10</sup> Rmol.com/partai islam harus bersatu/6 agustus 2012

Hal ini dikemukakan oleh, Iqbal Syabanu :

*Yang pasti kembali lagi kepada kandidat yang diusung seperti track and recordnya kapasitas dan kualitasnya dalam memimpin jangan beli kucing dalam karung.<sup>11</sup>*

Pendapat tersebut lahir disebabkan karena kurang nya pembeda antara partai politik Islam dan partai nasionalis. Justru yang seharusnya dilakukan oleh partai politik Islam malah dilakukan oleh partai yang berbasis nasionalis. Ditambah dengan ketika partai politik Islam terkena kasus yang bertentangan dengan tujuan partai tersebut dan menyebabkan merugikan masyarakat banyak. Sehingga media akan berlomba-lomba mengekspos kasus tersebut yang menyebabkan kurangnya simpati masyarakat terhadap partai politik Islam.

Kendati demikian, meskipun banyaknya masalah yang dihadapi oleh partai Islam, namun masih ada kader yang simpati dan tetap memilih partai Islam tersebut. Ini disebabkan oleh faktor politik identitas. Yaitu keberpihakan politik yang dilandasi oleh nilai agama.

Rizky Amanda berpendapat :

*Saya pilih yang Islam. Karena saya umat Islam dan semua sistem akan berjalan dengan baik jika mengikuti sistem Islam.<sup>12</sup>*

Visi misi adalah bagian terpenting dalam melihat sosok calon yang akan memimpin dalam sebuah negara. Melalui visi misi tersebut kita akan tahu apa saja yang akan dilakukan calon tersebut kedepannya. Selain visi misi latar belakang atau biasa disebut dengan rekam jejak.

---

<sup>11</sup> wawancara dengan Iqbal Syabanu ketua kom Hukum UBL 05/01/2018

<sup>12</sup> Wawancara Rizky Amanda Sekum Kom Teknik Unila 04/01/2018

Seperti pendapat Abu Rizal:

*“Melalui track and record serta visi misi yang diwacanakan oleh calon tersebut kita dapat mengetahui kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin.”*<sup>13</sup>

Faktor rekam jejak menjadi salah satu variabeli pemilih dalam menentukan pilihan politik. Rekam jejak ini meliputi kiprah partai, kinerja kader, dan citra partai politik dimata publik.

Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wilhem Buerklin yang mengatakan bahwa memilih berdasarkan rekam jejak adalah pilihan tingkat tertinggi yang dilakukan oleh public. Dimana publik melihat keseusian antara rekam jejak dengan program yang ditawarkan.<sup>14</sup>

Perspektif Kader HMI terhadap adanya kasus-kasus yang menjerat Partai Politik Islam dan oknumnya sangat disayangkan oleh kader karena tidak sepatutnya dan tidak pantas partai yang menggunakan agama terjerat kasus hukum. hakikatnya agama telah melarang yang namanya korupsi, gratifikasi dan lain-lain yang berbau merugikan masyarakat banyak atau negara.

Berikut ini hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan hasil analisis data dan wawancara :

1. Dari sisi perspektif (positif)

- a. Kader HMI memandang partai politik Islam adalah ejawantah dari ideology politik Islam. Kader HMI memandang, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur segala kehidupan manusia, termasuk politik.

<sup>13</sup> Wawancara Abu Rizal pengurus HMI Cabang Bandar Lampung 21/01/2018

<sup>14</sup> [https://nuls.wordpress.com/pilkada-dan-soal-bagaimana-pilihan -ditentukan/](https://nuls.wordpress.com/pilkada-dan-soal-bagaimana-pilihan-ditentukan/) diakses pada tanggal 27/01/2018.

- b. Sebagian besar kader HMI memandang positif adanya partai Islam, serta mengapresiasi kprah partai Islam yang telah berkontribusi untuk kemajuan sistem demokrasi Indonesia. Namun disayangkan, ada beberapa kasus yang menimpa partai Islam yang seharusnya tidak terjadi seperti korupsi, perpecahan, tendensi golongan.
  - c. Dalam Islam, budaya koruptif tidak dibenarkan, karena melanggar azaz politik Islam yang mengedepan nilai amanah. Begitu juga dengan budaya perpecahan sangat dilarang dalam Islam, karena Islam mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Terakhir tidak boleh adanya tendensi golongan karena berpotensi merasa benar sendiri.
2. Dari sisi dampak persepektif kader HMI terbagi menjadi 3 kelompok. Yaitu:
  - a. Politik identitas : kader menganggap bahwasanya melalui memilih partai politik Islam dalam pemilu itu adalah bentuk pertanggungjawabannya terhadap agama Islam, apalagi dinegara indonesia yang menganut azaz demokrasi partai politik adalah salah satu bentuk perjuangan untuk menegakan syariat Islam.
  - b. Visi misi yang jelas, kader HMI menganggap bahwasanya tidak perlu melihat latar belakang dari patai. tetapi yang lebih diutamakan adalah visi misi dan kemampuan profesionalitas dari calon tersebut.
  - c. Partai nasionalis, kader menggap bahwasanya sekarang ini semua partai hampir sama tidak ada perbedaan yang menonjol bahkan hal yang seharusnya menjadi identitas partai Islam justru ada pada partai nasionalis. hal ini dengan terbukti dibentuklah pengajian dan majelis-najelis oleh partai nasionalis sebagai salah satu sarana untuk mendulang massa umat Islam.

- d. Sebagian besar kader HMI menilai partai Islam seharusnya bersatu menjadi satu partai Islam. Karena, dengan adanya partai politik Islam akan memudahkan umat Islam dalam menentukan sebuah pilihan.





## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Pengetahuan kader mengenai partai politik khususnya partai politik Islam di Indonesia merupakan sikap yang mencerminkan kepedulian kader tentang pentingnya peran partai politik dalam penentuan arah kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun tidak bisa dipungkiri Himpunan Mahasiswa Islam adalah Organisasi yang bersifat Independen sehingga tidak ada yang namanya instruksi dari pengurus besar, badko, maupun cabang, serta komisariat agar kader untuk memilih partai manapun dalam pemilu baik itu partai berbasis nasionalis maupun partai yang berbasis Islam (secara simbol maupun azas). Karena kader adalah pada hakikatnya mahasiswa yang notabenenya sebagai agen perubahan, *Iron Stock*, kontrol sosial yang bebas menentukan keinginannya terkait pilkada apalagi pilkada itu hal yang akan menentukan baik buruknya negeri kita.

Adanya kasus-kasus yang menjerat partai Islam dan oknumnya sangat disayangkan oleh kader karena tidak sepatutnya dan tidak sepatasnya partai yang menggunakan agama terjerat kasus hukum. hakikatnya agama telah melarang yang namanya korupsi, gratifikasi dan lain-lain yang berbau merugikan masyarakat banyak atau negara.

## B. Saran

Sebagai sebuah negara yang mayoritas Islam penduduknya beragama Islam terbesar di Asia tenggara bahkan Dunia seharusnya Partai Politik Islam dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. adanya partai Politik Islam di Indonesia ini seharusnya bisa sebagai penyampai aspirasi masyarakat Indonesia namun sangat disayangkan malah partai Poltitik Islam yang notabenenya mengetahui mana yang baik dan buruk malah terjat kasus hukum yang merugikan Masyarkat banyak.

Partai Politik Islam seharusnya menjadikan Islam sebagai pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan segala kegiatan atau rutinitas di dalam partai. anggota partai itu agar kiranya agar memahami apa itu Partai Islam dan bedanya dengan partai lain sehingga ini dapat menjadi alasan masyarakat untuk memilih partai tersebut.

dalam penjaringan anggota seharusnya partai memang melakukan tebang pilih agar tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan yang dapat membuat buruk citra tersebut dan juga agama islam dikarenakan kelakuan oknumnya.

Demikianlah karya ilmiah penulis ini yang disusun dalam bentuk skripsi, mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis khususnya , bagi para aktivis HMI khususnya Komisaariat Ushuluddin dan umumnya pada para pembaca. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal isi maupun dalam penulisan. Penulis berharap masukan dan saran dari para pembaca sekalian demi perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdurrahman, Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta)
- Alfan, M. Alfian, *HMI (Himpunan mahasiswa Islam)*, (Jakarta: PT Kompas media nusantara, 2013)
- Alfan, M. Alfian, *HMI 1963-1966; Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013)
- Arikunto, Suharsimi, *Prodsedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Bhineka Cipta. 1997)
- Badan Pengelola Latihan, *pedoman perkaderan membentuk kader-kader muslim intelegensia*, (Serang : himpunan mahasiswa islam cabang serang, 2016)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2006)
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009)
- Deddy, Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Efendi, Djohan, dan Natsir, Ismet, *Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3ES,2003)
- Efendy, Bachtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2009)
- Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002)

- Hs, M. Noor, *Himpunan Istilah Psikologi*, (Jakarta : Cv Pedoman Ilmu Jaya. 1997)
- Jamilah, Dewi Siti, *Intelektual Profetik kerakyatan* , (Yogyakarta: Crative Minority, cet-1 2003)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Umum* (Bandung: Alumni,1984)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1981)
- Kurnia, Ivan, *Sejarah Perjalanan HMI Cabang Bandar Lampung* (Bandar Lampung: HMI Cabang Bandar lampung Press, 2016)
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaaan*, (bandung : Mizan, 1985)
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Data Sekunder*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada edisi revisi-2.2011)
- Muchri HA Fauzi, Mochamad Ade komarudin, *HMI menjawab tantangan zaman*, (Jakarta: P.T Gunung kelabu, 1990)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muin, Abd Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1994)
- Munawar-Rachman, Budhya, *Ensiklopedia Nurcholis Madjid : Pemikiran Islam di Kanvas peradaban* (Jakarta: Mizan, 2006)
- Musa, Muahmmad dan Nurfitri, Titi, *Metode penelitian*,( Jakarta: Fajar Agung. 1992)
- Narbuko, Cholid dan Ahmad, H. Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara. 1997)
- Pamungkas, Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2012)
- Sobby Kesuma, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*, (Bandar Lampung 2011)

- PB HMI, *Hasil-hasil Kongres HMI XXVIII*, (Depok, 15 Maret-15 April 2013)
- Prastya, Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999)
- Qodir, Zuly *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : remaja rosdakarya. edisi revisi 2001)
- Ramli, HM Yusuf, *50 Tahun HMI Mengabdikan Republik*, (Jakarta: LASPI, 1997)
- Salim, Arskal, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara* (Jakarta: JPRR Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999)
- Sitompul, Agussalim, *44 Indikator Kemunduran HMI* (Jakarta: PT Rakasta Samasta, cet-1 2005)
- Sitompul, Agussalim, *Historiografi HMI 1947-1993* (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1995)
- Sitompul, Agussalim, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI, (1947-1997)*, Jakarta: LOGOS, 2002)
- Sitompul, Agussalim, *44 Indikator Kemunduran HMI*, (Jakarta: PT Rakasta Samasta, cet-1 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Sutrisno, Hadi, *Metode Penelitian, jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset. 1989)
- Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Research I*, (Yogyakarta: YP Fak, Psikologi UGM, 1985)
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research; jilid 2* (yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Suyanto, Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

syafii'e, Inu kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Tanja, Victor, *Himpunan Mahasiswa Islam : Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)

Tukimin, M. Santo dan Zainal, Moehadi *Administrasi & organisasi Perjuangan*, (yogyakarta : penerbit sinta. 1966)

Undang-Undang Pemilihan Umum dilengkapi penjelasan pada setiap Undang-undang nya , *Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang tentang Partai politik Islam* (Jakarta: Eska Media Press, cet. Ke1, 2009)

Urbaningrum, Anas, *Islam-Demokrasi : Pemikiran Nurcholia Madjid*. (Jakarta : Penerbit Republika, 2004)

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offsed, 1994)

Wibowo, Satria hariqo, *Lafran Pane :Jejak Hayat dan Pemikirannya* (Jakarta: Penerbit Lingkar, 2011)

Yanuar, Ikbar, *Metode penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: PT repika Aditama, cet-2 2014)

Zuliah, Nurul, *metode penelitian sosial dan pendidikan*, (Jakarta : Bumi aksara, 2002)

## SUMBER LAIN

Republika Online

Rmol.com/partai islam harus bersatu/6 agustus 2012

Voa-islam.com/umat islam harus menang dan berkuasa/18 juni 2013/

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/12/04/03/m1svbm-mengembalikan-peran-partai-politik>

<https://nulsa.wordpress.com/pilkada-dan-soal-bagaimana-pilihan -ditentukan/>

[https://CNNIndonesia.com/tak bisa terjemahkan nilai agama parpol islam sulit menangh/kamis, 25/1/2018](https://CNNIndonesia.com/tak-bisa-terjemahkan-nilai-agama-parpol-islam-sulit-menangh/kamis,25/1/2018)

[www.duniaislam.org/23/03/2015/pengertian-islam-menurut-bahasa-dan-istilah-dalam-al-qur'an](http://www.duniaislam.org/23/03/2015/pengertian-islam-menurut-bahasa-dan-istilah-dalam-al-qur'an)

<http://hmibwi.blogspot.co.id/2011/04/analisis-peran-hmi-dalam-pergulatan.html>

<https://id.m.wikipedia.org>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandar\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung)

[https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan informan-penelitian/](https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/)





L

A

M

P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung (0721) 703289*

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

Partai Politik Islam Dalam Perspektif Kader HMI Cabang Bandar  
Lampung

**Pertanyaan**

1. Bagaimanakah pandangan anda tentang Partai Politik Islam?...jelaskan
2. Bagaimana Tanggapan anda jika Partai Politik Islam itu hanya satu ?  
setuju atau tidaka setuju dan apa alasannya?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang permasalahan yang ada di partai islam  
saat ini?....jelaskan
4. Apakah anda ketika dalam pileg memilih partai islam atau partai  
nasionalis?....jelaskan
5. Apakah ketika anda menjadi seorang politisi anda memilih partai islam atau  
partai Nasionalis?....jelaskan

## 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;

- KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
- H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti
- Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangny Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau

PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala.”

1. PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik. Pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen). Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP mendapatkan 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan.
2. .Pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26,11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan.
3. Pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara arau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
4. Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan.
5. Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan.
6. Pada Pemilu 1999 PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.
7. Pada Pemilu 2004 PPP meraih 9.248.764 atau 8,14 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP tetap meraih 58 kursi atau 10,54 persen dari 550 kursi yang diperebutkan.

8. Pada Pemilu 2009 PPP meraih 5,5 juta suara atau 32 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan.

Daerah yang memberikan kontribusi perolehan kursi atau sebaliknya tidak memberikan kontribusi kursi bagi PPP adalah:

- a. Pada Pemilu 1977, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 84,62 persen dari 26 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.
- b. Pada Pemilu 1982, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.
- c. Pada Pemilu 1987, PPP meraih kursi pada 22 provinsi atau 81,84 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timur Timur.
- d. Pada Pemilu 1992, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.
- e. Pada Pemilu 1997, PPP meraih kursi pada 18 provinsi atau 66,66 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Timor Timur.

- f. Pada Pemilu dipercepat tahun 1999, PPP meraih kursi pada 24 provinsi atau 88,88 persen dari 27 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Bali, Irian Jaya, dan Timur Timur.
- g. Pada Pemilu 2004, PPP meraih kursi pada 23 provinsi atau 69.69 persen dari 33 provinsi. Provinsi yang tidak menghasilkan kursi bagi PPP adalah Babel, Kepri, DIY, Bali, NTT, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua



Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP atau P tiga) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2014 PPP mendapat 39 kursi (7,00%) di DPR hasil Pemilu Legislatif 2014, setelah mendapat sebanyak 8.157.488 suara (6,53%).

Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	%	Hasil	Urutan
1977	99 / 360	18.743.491	29,29%	Partai baru	2
1982	94 / 360	20.871.880	27,78%	▼ 5 kursi	2
1987	61 / 400	13.701.428	15,96%	▼ 33 kursi	2
1992	62 / 400	16.624.647	17,00%	▲ 1 kursi	2
1997	89 / 425	25.340.028	22,43%	▲ 27 kursi	2



1999	58 / 462	11.329.905	10,71%	▼ 31 kursi	3
2004	58 / 550	9.248.764	8,15%	— 0 kursi	4
2009	38 / 560	5.533.214	5,32%	▼ 20 kursi	6
2014	39 / 560	8.157.488	6,53%	▲ 1 kursi	8

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia beraskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.

Latar belakang

Partai Bulan Bintang telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.. Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden SBY, Yusril juga dikenal sebagai tokoh yang memelopori Amendemen Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI. Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai. Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB[1] menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.



Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	Persentase	Hasil	Urutan
<a href="#">1999</a>	13 / 462	2.049.708	1,94%	<i>Partai baru</i>	6

<a href="#">2004</a>	11 / 550	2.970.487	2,62%	▼ 2 kursi	8
<a href="#">2009</a>	0 / 560	1.864.752	1,79%	▼ 11 kursi	10
<a href="#">2014</a>	0 / 560	1.825.750	1,46%	— 0 kursi	11

Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia.[2] Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.[3]

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap.[3] Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus.[4] Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah

Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.[4] Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.

Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.[5] Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986.[6]. Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).[7] KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah.[4] Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.[3]

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat

tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.[8] Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.[3][9]

Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.[3] Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sejak kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.[10] Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat.[11]

Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara.[12] Hidayat menyerahkan

jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS

## Perolehan suara

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	%	Hasil	Urutan
<a href="#">1999</a>	7 / 462	1.436.565	1,36%	<i>Partai baru</i>	7
<a href="#">2004</a>	45 / 550	8.325.020	7,34%	▲ 38 kursi	6
<a href="#">2009</a>	57 / 560	8.204.946	7,88%	▲ 12 kursi	4
<a href="#">2014</a>	40 / 560	8.480.204	6,79%	▼ 17 kursi	7













**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp.(0721) 703289*

**KARTU KONSULTASI**

NAMA : NAFIS  
NPM : 1331040039  
JURUSAN : Pemikiran Politik Islam (PPI)  
PEMBIMBING I : Drs. Effendi, M. Hum  
PEMBIMBING II : Ellya Rosana, S.Sos, M.H  
JUDUL SKRIPSI : **PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF KADER HMI  
CABANG BANDAR LAMPUNG**

NO	Pembimbing	Tanggal Konsultasi	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Drs. Effendi, M. Hum	28-05-2017		Konsultasi proposal
2	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	12-04-2017		Konsultasi proposal
3	Drs. Effendi, M. Hum	16-06-2017		Acc Proposal
4	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	12-06-2017		Acc Proposal
5	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	07-08-2017		Konsultasi BAB I-V
6	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	09-10-2017		Konsultasi BAB I-V
7	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	27-11-2017		Konsultasi BAB I-V
8	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	12-10-2017		Konsultasi BAB I-V
9	Drs. Effendi, M. Hum	22-01-2018		Konsultasi BAB I-V
10	Drs. Effendi, M. Hum	25-01-2018		Konsultasi BAB I-V
11	Drs. Effendi, M. Hum	11-02-2018		Acc Skripsi
12	Ellya Rosana, S.Sos, M.H	30-01-2018		Acc Skripsi

**Pembimbing I**

**Drs. Effendi, M.Hum**  
**NIP. 195807211986031004**

**Bandar Lampung, 2018**  
**Pembimbing II**

**Ellya Rosana, S.Sos, M.H**  
**NIP. 19741223199032002**